



RISALAH RAPAT PARIPURNA

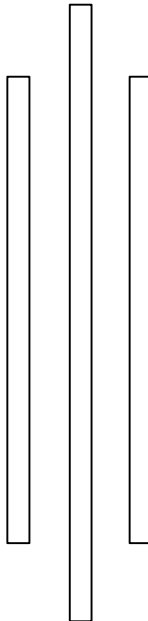
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2024-2025

DPRD KABUPATEN SITUBONDO

TANGGAL 02 JUNI 2025

ACARA

**PERSETUJUAN DAN PENETAPAN (PEMBICARAAN TINGKAT II)
RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN 2024**



Ditebitkan Oleh :

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

TAHUN 2025

**Jl. Kenanga No.1 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo
Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur**

www.dprd.situbondokab.go.id

DAFTAR ISI

Jadwal Rapat Paripurna.....	2
Risalah Rapat Paripurna.....	3
- Persetujuan dan Penetapan (Pembicaraan Tingkat II) Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.....	8
Berkas Pendukung.....	90
Daftar Hadir.....	94
Foto Kegiatan.....	108

JADWAL RAPAT PARIPURNA
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2024-2025
DPRD KABUPATEN SITUBONDO
TANGGAL 02 JUNI 2025

NO	HARI/ TANGGAL	ACARA
1	Senin / 02 Juni 2025 Pukul 13.00 WIB	Persetujuan dan Penetapan (Pembicaraan Tingkat II) Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 Susunan Acara I : 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Laporan Badan Anggaran; 3. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi; 4. Persetujuan DPRD; 5. Penandatanganan Berita Acara; 6. Pendapat Akhir Kepala Daerah; 7. Penutup.

**RISALAH RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Hari : Senin
Tanggal : 02 Juni 2025
Pukul : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Lantai II Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo

- I. JENIS** : Rapat Paripurna
II. SIFAT : Umum dan Internal
III. ACARA RAPAT : - **Penyampaian Nota Pengantar Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2024**

Susunan Acara I :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Laporan Badan Anggaran;
3. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi;
4. Persetujuan DPRD;
5. Penandatanganan Berita Acara;
6. Pendapat Akhir Kepala Daerah;
7. Penutup.

- IV. PIMPINAN RAPAT** : Nama : **MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Situbondo
V. SEKRETARIS RAPAT : Nama : **Drs. NUGROHO, M.Si**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Situbondo

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Partai Kebangkitan Bangsa	: 13 orang
2. Partai Persatuan Pembangunan	: 9 orang
3. Partai Gerindra	: 6 orang
4. Partai PDI-Perjuangan	: 5 orang
5. Partai Golongan Karya	: 5 orang
6. Partai Demokrat	: 3 orang
7. Partai Nasdem	: 2 orang
8. Partai Keadilan Sejahtera	: 1 orang
9. Partai Hanura	: <u>1 orang</u>

Jumlah : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Partai Kebangkitan bangsa	: 11 orang
2. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
3. Fraksi Gerakan Indonesia Maju	: 5 orang
4. Fraksi PDI-Perjuangan	: 5 orang
5. Fraksi Golongan Karya	: 5 orang
6. Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera	: <u>3 orang</u>

Jumlah : 37 orang

➤ FRAKSI PKB

NO	NAMA	JABATAN
1	MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.	Anggota PKB
2	MOKHAMMAD BADRI, S.T.	Ketua Fraksi
3	SITI MARIAH ULFA, S.H.	Wakil Ketua Fraksi
4	FIQI KRISTIA VINALOSA, A.Md.Keb.	Bendahara Fraksi
5	ZULFIKAR PURNAMA RAHMAN, S.T.	Anggota Fraksi

6	FADLAILUL WAFIR, S.Pd.	Anggota Fraksi
7	EDY WAHYUDI, S.E.	Anggota Fraksi
8	M. ASYHERI NUR, S.Sy.	Anggota Fraksi
9	YAZID HASYIM	Anggota Fraksi
10	MUZAMMIL DAMAN HURI, S.H.	Anggota Fraksi
11	AHMAD JUNAIDI	Anggota Fraksi

➤ **FRAKSI PPP**

NO	NAMA	JABATAN
1	H. Abd. RAHMAN, S.H., M.H	Anggota Fraksi
2	MUHAMMAD HASAN ILLYIN, S.Psi.	Sekretaris Fraksi
3	IRMA NOERVADILA, S.Pd, M.Pd.	Bendahara
4	Dr. Drs. H. SOFWAN HADI, M.Si	Anggota Fraksi
5	H. FAISOL / ABD. SYAKUR JALIL	Anggota Fraksi
6	NURIL HASHINA, S.H.	Anggota Fraksi
7	Dra. Hj. UMI MASLAHAH	Anggota Fraksi
8	M. FAISOL, S.Pd.I., M.Pd.I.	Anggota Fraksi

➤ **FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU (GIM)**

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. H. HAMBALI, M.Pd.	Anggota Fraksi
2	ANDRIAN OKTADIANSYAH, S.E.	Ketua Fraksi
3	HARI BUDI PRASETYA, A.Md.	Sekretaris Fraksi
4	AFIF REZA RIMUNDA, S.H.	Bendahara
5	ZAIDANI	Anggota Fraksi

➤ **Partai PDI P**

NO	NAMA	JABATAN
1	ANDI HANDOKO, S.M.	Sekretaris Fraksi
2	RUDI AFianto, S.Pd, M.Pd.	Ketua Fraksi
3	NINGSIH MS, S.Pdi, M.Pd.	Wakil Ketua Fraksi
4	RISKIYAH NURFADILA, S.Sos.	Anggota Fraksi
5	SUPOYO, S.H.	Anggota Fraksi

➤ **Partai GOLKAR**

NO	NAMA	JABATAN
1	RACHMAD, SH, M.Hum.	Ketua Fraksi
2	HEROE SOEGIHARTONO, S.H.	Sekretaris Fraksi
3	SISWO PRANOTO, S.H.	Bendahara
4	Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.	Anggota Fraksi
5	TUMYANI	Anggota Fraksi

➤ **Partai DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA**

NO	NAMA	JABATAN
2	H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI	Sekretaris Fraksi
4	YOGI PRATAMA, S.Sos.	Anggota Fraksi
5	TOTON BENI MARTONO, S.Kep.	Anggota Fraksi

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR :

1. Fraksi Kebangkitan Bangsa : 2 orang
2. Fraksi Persatuan Pembangunan : 1 orang
3. Fraksi Gerakan Indonesia Maju : 3 orang
4. Fraksi PDI-Perjuangan : - orang
5. Fraksi Golongan Karya : - orang
6. Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera : 2 orang

Jumlah : 8 orang

Yaitu :

➤ FRAKSI PKB

NO	NAMA	JABATAN
1	JOHANTONO, S.Pd	Sekretaris Fraksi
2	SUPRAPTO	Anggota Fraksi

➤ FRAKSI PPP

NO	NAMA	JABATAN
1	ARIFIN, S.H.I., M.H.	Ketua Fraksi

➤ FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU (GIM)

NO	NAMA	JABATAN
1	DJAENUR RIDOH	Anggota Fraksi
2	SAMSI IKA SARI, S.Pd.	Anggota Fraksi
3	ROZAN FATIH FIGURRAHMAN HAFID	Anggota Fraksi

➤ Partai PDI P

NO	NAMA	JABATAN
-	-	-

➤ **Partai GOLKAR**

NO	NAMA	JABATAN
-	-	-

➤ **Partai DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA**

NO	NAMA	JABATAN
1	JANUR SASRA ANANDA, S.E.	Ketua Fraksi
2	AHMAD MUHLISIN, S.P..M.M.	Bendahara

VIII. TURUT HADIR :

- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Situbondo
- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Situbondo

IX. JALANNYA RAPAT :

----- PROTOKOL -----

Mohon ijin bapak ibu

Mengawali acara dengan rasa nasionalisme kepada tanah air Indonesia.

hadirin dimohon berdiri.

Menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya

>>>>>>> LAGU INDONESIA RAYA <<<<<<<<<<<

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Bapak ibu yang kami hormati, acara selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat.

Kepada yang terhormat Bapak Mahbub Junaidi, S.H.I. kami persilahkan.

----- **PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)** -----

ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLHI WABAROKATU.

Yth. Sdr. Wakil Bupati Situbondo.

Yth. Segenap Para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Situbondo.

Yth. Segenap Para Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Situbondo hadir saat ini Kapolres Situbondo atau yang mewakili, Komandan Kodim 0823 Situbondo atau yang mewakili.

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.

Yth. Para Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Para Pimpinan Perangkat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Yth. Sdr. Camat se Kabupaten Situbondo, Direktur RSUD, Pimpinan BUMD, serta rekan-rekan Media yang kami hormati.

Mengawali acara ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanallahu Wata'la, karena hanya atas rahmat dan Maunah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini dapat berkumpul bersama dalam rangka mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo dengan agenda (Pembicaraan Tingkat II) dalam rangka Persetujuan dan Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Semoga kehadiran kita saat ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanallahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa.

Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wasallam serta seluruh sahabat dan pengikutnya.

Marilah kita mengawali seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan pembacaan Sholawat Nariyah,.....

'Ala hadihinniyah wa'ala kulli niyyatin sholihah, alfatihah...

Terima kasih

Rapat Dewan dan Hadirin yang Kami hormati,

Atas nama Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo tidak lupa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perhatian serta kesediaan Saudara-Saudari untuk menghadiri undangan kami pada acara Rapat Paripurna ini.

Sebelum acara ini dimulai, saya mohon dengan hormat kepada seluruh peserta rapat untuk dapatnya menjaga ketertiban sehingga seluruh kegiatan Rapat Paripurna ini dapat berlangsung dengan aman, tertib dan lancar serta memperoleh hasil sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Rapat Dewan dan Hadirin yang Kami hormati,

Menurut catatan daftar hadir dari Saudara Sekretaris DPRD bahwa dari 45 orang Anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir adalah sejumlah 34 orang, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD maka kuorum dapat terpenuhi dan dengan mengucapkan:

=====: BISMILLAHIRROHMANIRROHIM :=====

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo pada hari ini Senin tanggal 2 Juni 2025 dengan agenda Pembahasan dan Persetujuan (Pembicaraan Tingkat II) Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1 KALI

Adapun susunan acara Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Laporan Badan Anggaran;
3. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi;
4. Persetujuan DPRD;
5. Penandatanganan Berita Acara;
6. Pendapat Akhir Kepala Daerah;
7. Penutup.

Demikian susunan acara Rapat Paripurna hari ini, selanjutnya marilah kita masuki acara yang kedua yaitu Laporan Badan Anggaran.

Untuk itu kami persilahkan kepada Dr. H. Hambali, M.Pd. Wakil Ketua Badan Anggaran untuk menyampaikan laporannya, disilahkan

=====

PENYAMPAIAN LAPORAN BADAN ANGGARAN

=====

----- Wakil Ketua DPRD (Dr. H. Hambali, M.Pd.) -----



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Jalan Kenanga No. 1, Patokan, Situbondo Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Hasil evaluasi DPRD terhadap tingkat efektifitas implementasi kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Situbondo 2024, dimana pada RKPD Tahun 2024 digariskan kebijakan sebagai berikut:
 - 1) Optimalisasi pemungutan pajak daerah dengan memanfaatkan data potensi pajak yang dimiliki, khususnya terhadap wajib pajak daerah yang hingga saat ini belum dilakukan pemungutan pajak daerah;
 - 2) Pemberian insentif pajak sebagai bentuk adaptasi ekonomi rebound pasca Covid-19, sekaligus menarik dan memperluas objek pajak daerah Kabupaten Situbondo.
 - 3) Memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah, seperti: e-BPHTB; e-PAD; NPWPD; serta merencanakan dan melaksanakan pemasangan Alat Perekam Transaksi Elektronik (APTBE) khususnya pajak hotel, pajak restaurant, pajak hiburan dan pajak parkir; dan sebagainya;
 - 4) Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan pajak daerah, serta melakukan verifikasi terhadap laporan pajak daerah dari wajib pajak Self Assessment;
 - 5) Meningkatkan kapasitas SDM pemungut pajak/retribusi daerah di Kabupaten Situbondo melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - 6) Meningkatkan koordinasi secara lebih intensif dengan perangkat daerah dan instansi terkait serta pihak-pihak terkait lainnya dalam penentuan dan perencanaan target pajak dan retribusi daerah,

pemetaan potensi-potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta menyusun perencanaan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

- 7) Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 8) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan penyediaan dan peningkatan pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat, untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah; dan
- 9) Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi sebagai upaya penjaminan ketersediaan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan dana bantuan keuangan dari provinsi.

Terhadap 9 butir arah kebijakan pendapatan daerah tersebut, dapat disampaikan hasil evaluasi DPRD sebagai berikut:

- 1) Komitmen Pemda Situbondo untuk mengupayakan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah sebagaimana di RKPD 2024 masih belum terbukti pelaksanaannya dalam pengelolaan PAD Tahun 2024;
- 2) Pemerintah Kabupaten Situbondo sangat sulit dalam meningkatkan kemandirian daerah dan/atau mengurangi ketergantungan secara finansial terhadap pemerintah pusat terutama karena:
 - a. Pelaksanaannya pengelolaan PAD Tahun 2024 belum berbasis data potensi,
 - b. Masih banyak kebijakan diskresi kepala OPD pemungut yang melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang PDRD;
 - c. Upayakan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber PAD setiap tahun selalu menjadi komitmen kebijakan umum anggaran (KUA) daerah tetapi tidak ditindaklanjuti dengan implementasi di tingkat OPD terkait,
 - d. Pengelolaan aset daerah setiap tahun terjadi kelemahan pengendalian internal yang banyak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku,
- 3) Kondisi makro ekonomi pada tingkat nasional, regional, maupun local seringkali terabaikan atau tidak menjadi dasar perhitungan dalam

perencanaan penganggaran daerah, tahun 2024 diperparah dengan perencanaan pendapatan daerah yang *top down* di internal TAPD berakibat terjadi *anomali* target dan tingkat realisasi pendapatan daerah.

2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Situbondo semetinya dalam menyusun target penerimaan pajak daerah memeriksa secara cermat terhadap usulan target penerimaan pajak daerah dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terutama memastikan:
 - a. Bahwa target penerimaan pajak daerah didukung dengan penjelasan data-data yang rasional dan terukur sesuai potensi pendapatan target pajak daerah yang dimiliki oleh Bapenda.
 - b. Bahwa di dalam penyusunan target penerimaan pajak daerah, BPKAD dan Bapenda harus dapat bekerjasama merancang target penerimaan pajak daerah berdasarkan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah tersebut. Contohnya tingkat inflasi, stabilitas harga, indeks kemudahan berusaha, jumlah penduduk, kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan dan konektivitas infrastruktur.
3. Di dalam penyusunan target pendapatan asli daerah (PAD) ke depan, BPKAD dan BAPENDA hendaknya secara serius mengikuti arahan BPK sebagaimana dalam LHP BPK atas LKPD Situbondo tahun 2024, khususnya bagaimana perangkaan target penerimaan PAD didasarkan pada analisis potensi pendapatan daerah. Seperti analisis yang disajikan BPK dalam Tabel berikut :

Tabel 15 Perhitungan Kehilangan Potensi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar

No	Nama dan Tipe Pasar	Retribusi Pelayanan Pasar	
		Realisasi Tahun 2024	Potensi Yang dihitung berdasarkan luas kios, los, pelataran (selama 1 tahun)
	Pasar Tipe A		
1	Pasar Besuki Lama	175.837.800,00	630.196.000,00
2	Pasar Besuki Baru	62.480.900,00	122.511.423,00
3	Pasar Panji	507.517.500,00	2.309.165.008,80
4	Pasar Panarukan	186.211.200,00	189.463.500,00
5	Pasar Andirejo Pagi	157.788.800,00	203.468.250,00
6	Pasar Andirejo Sore	117.247.300,00	138.592.000,00
7	Pasar Asembagus	182.653.000,00	264.740.990,85
8	Pasar Widoropayung	69.170.600,00	246.685.062,50
9	Pasar Mimbaan Baru	232.652.100,00	533.299.460,00
10	Pasar Sumberkolak	193.230.900,00	407.141.690,00
11	Pasar Pabrik	101.142.700,00	122.120.000,00
12	Pasar Kampung	79.896.900,00	118.954.145,50
	Pasar Tipe B		
1	Pasar Curah Kalak	66.051.200,00	63.367.500,00
2	Pasar Kapongan	39.460.200,00	62.582.062,50
3	Pasar Manganan	77.080.700,00	67.787.250,00
	Pasar Tipe C		
1	Pasar Olean	39.708.800,00	71.765.309,00
2	Pasar Wringlanom	34.602.700,00	43.886.875,00
	Pasar Tipe D		
1	Pasar Kalbut	3.642.000,00	27.157.500,00
2	Pasar Patok	29.279.500,00	-
	Jumlah	2.355.654.800,00	5.622.884.026,15

Akibat Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Yang Tidak Sesuai Ketentuan, Menyebabkan Pemerintah Kabupaten Situbondo Mengalami Banyak Potensi Kehilangan Pendapatan Pajak Daerah

- Terdapat Pemilik Usaha yang Belum Ditetapkan Sebagai Wajib Pajak Daerah, Belum Dipungut Pajak,
- Wajib Pajak Tidak Melaporkan Pajaknya Sesuai dengan Omzet Penjualan yang Riil,
- WP Hotel dan WP Restoran Belum Seluruhnya Terpasang Aplikasi Tax Monitor
- Pendapatan PBB-P2 Belum Dilakukan Pemutakhiran Data Luasan Bangunan Objek Pajak
- Ketidaksesuaian Data Spasial dan Data Atribut PBB-P2 dalam Sistem Informasi Pajak Daerah

Oleh karena itu DPRD merekomendasikan agar :

- a) Badan Pendapatan Daerah agar memanfaatkan *Tax Monitor*, mengawasi dan mengevaluasi serta menentukan alternatif pengendalian atas kelemahan dalam penggunaan *Tax Monitor*,
 - b) Melaksanakan pendataan potensi pajak dengan berkoordinasi dengan pihak terkait,
 - c) Memeriksa SPTPD dan mengevaluasi kepatuhan wajib pajak daerah secara berkala.
4. Badan Pendapatan Daerah sudah seharusnya melaksanakan fungsinya dalam menetapkan perhitungan target pendapatan pajak dan retribusi daerah berdasarkan pada pendataan potensi riil dengan memperhatikan komponen lainnya, sebagaimana diatur dalam peraturan pedoman penyusunan APBD dan peraturan terkait lainnya.
 5. Bapenda agar menerbitkan panduan atau pedoman analisis kertas kerja usulan proyeksi pendapatan dengan format dan metode perhitungan yang dapat secara seragam dipergunakan oleh perangkat daerah pemungut. Hal ini agar dicapai usulan penerimaan retribusi daerah yang andal didukung perhitungan dan pertimbangan yang jelas.
 6. Kepala OPD pemungut retribusi terkait agar secara cermat dan konsisten melaksanakan perencanaan, pemungutan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan pendapatan retribusi daerah.
 7. Bendahara Penerimaan masing-masing OPD harus melaksanakan ketentuan tarif sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2023 untuk penerimaan retribusi.
 8. Kepala Dinas Perhubungan memastikan perubahan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum dapat segera ditindaklanjuti dengan penyesuaian tarif di aplikasi Bapenda Provinsi Jawa Timur.
 9. Terhadap banyaknya kelemahan pengelolaan keuangan daerah Tahun 2024, baik sebagaimana dicatat dalam LHP BPK RI, hasil pembahasan Badan Anggaran, Laporan pembahasan tingkat Komisi dan pendapat Fraksi-fraksi, maka DPRD merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan SIPD harus dipastikan secara menyeluruh dan terintegrasi baik Informasi Pembangunan Daerah maupun Informasi Keuangan Daerah pada tahun 2024.
- b. Seluruh OPD yang berkepentingan dalam peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan PAD segera menyusun dokumen pemutakhiran data potensi PAD yang menjadi tanggung jawabnya, untuk diserahkan kepada DPRD Situbondo agar dicapai pengelolaan PAD yang memadai.
- c. Bupati agar meningkatkan kapasitas Badan Pendapatan Daerah agar mampu melaksanakan supervisi pendataan potensi berbagai Pos PAD dengan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka memutakhirkan data PAD secara periodik.
- d. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hendaknya meningkatkan kapasitas SDM yang bertanggungjawab melaksanakan penelitian dan verifikasi Rencana Kegiatan Anggaran SKPD, khususnya atas rasionalisasi pendapatan maupun belanja masing-masing.
- e. Terkait dengan banyaknya temuan BPK atas pelaksanaan pembangunan GOR Situbondo, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- f. Bupati agar mendorong inovasi dari SKPD penanggungjawab asset daerah dalam tata kelola khususnya melakukan inventarisasi aset daerah yang menjadi tanggung jawabnya secara berkala, sampai bagaimana asset daerah mampu didayagunakan bagi sumber-sumber penerimaan PAD.
- g. Hasil pemantauan atas tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Situbondo terhadap temuan BPK RI atas LKPD 2024 merunjukkan masih ada 30 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Oleh karena itu, agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari, Badan Anggaran meminta kepada inspektorat agar menuntaskan semua rekomendasi BPK RI atas LKPD 2024.

**CATATAN DAN REKOMENDASI KOMISI I,II,III DAN IV DPRD TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA. 2024**

KOMISI I

No	Mitra Kerja	Hasil Rapat
1	BAGIAN UMUM	➤ perencanaan dan pembangunan disesuaikan dengan realitas kebutuhan, namun harus tetap dengan kaidah kaidah perencananya.
2	BAGIAN ORGANISASI	➤ Untuk penyusunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani serta kematangan organisasi.
3	BAGIAN PEMERINTAHAN	➤ Agar menyusun LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) dan Penerapan standar pelayanan minimal.
4	BAGIAN HUKUM	➤ Agar dalam perencanaan lebih cermat.
5	BAGIAN PROTOKOL	➤ Untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap tata cara protokoler dan perfomance petugas protokol lebih menarik
6	INSPEKTORAT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Agar meningkatkan dan lebih cermat dalam melaksanakan review APBD dan tim asistensi DPA sehingga tidak terjadi salah saji. ➤ Membentuk satgas khusus terhadap tunggakan piutang PBBP2 , satpaskhusus untuk evaluasi terhadap produk muatan yang sudah di cabut tetapi masih dijalankan seperti retribusi pasar. ➤ Lebih meningkatkan pengawasan dan ketaatan serta kepatuhan OPD terhadap peraturan per UU.
7	BKPSDM	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Anggaran 36.189.243.537 Realisasi 33.466.285.497 Silpa 2.722.958.040 ➤ Alasan Silpa <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar pada Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK 1.849.182.523 Karena : adanya kelebihan penganggaran, meliputi ; <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya kelebihan jumlah PNS dan PPPK yg dianggarkan (karena ada rencana rekrut PNS dan PPPK baru) b. Adanya PPPK meninggal dunia 2 orang c. Adanya kelebihan Tunjangan Istri dan anak d. Adanya kelebihan PPH 2. Adanya kegiatan yg tidak dilaksanakan karena refocusing 3. Adanya kegitan tugas belajar S2/Dokter spesialis karena tidak ada pengajuan

No	Mitra Kerja	Hasil Rapat
8	DPMPTSP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anggaran dari APBD Kabupaten Situbondo tahun 2024 sebesar Rp7.174.348.165,00, dengan realisasi anggaran yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo sebesar Rp. 5.535.618.303,00, sehingga prosentase capaian penyerapan anggaran adalah sebesar 77,16% ➤ Alasan Silpa : adanya surat edaran bupati No 640 tahun 2024 tentang pedoman pelaksanaan apbd 2024, dimana disana sudah ada batas belanja DPMPTSP yaitu maksimal pada 5.921.140.056
9	BAKESBANGPOL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah anggaran TA. 2024. 42.831.207.800 Realisasi. 41.583.336.971 Silpa. 1.247.870.829 ➤ Alasan Silpa : Pengurangan (efisiensi) dan gaji silpa ± 200 jutaan.
10	SATPOL PP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah anggaran TA. 2024. 22.801.155.590 Realisasi. 19.203.808.909 Silpa. 3.597.346.680 (84.22%) ➤ DAU. 17.301.155.590 Realisasi. 15.241.460.655 Silpa. 2.059.694.655 (88.10%) Alasan Silpa : Karena penyesuaian anggaran efisiensi (Refocusing) dan tidak ada Perubahan APBD sehingga tidak bisa menggeser anggaran. ➤ DBHCHT. 5.500.000.000 Realisasi. 3.962.347.975 Silpa. 1.537.652.025 (72.04%) Alasan Silpa : ada beberapa kegiatan yang tidak disetujui oleh DJBK Jakarta diantaranya pemetaan rawaan pelaku rokok ilegal, ruang comen center dan pembuatan tower jaringan handy talkie serta jadwal pemberantasan rokok ilegal menyesuaikan jadwal dengan petugas bea cukai Jember tahun 2024 dan lagi sesuai jadwal selama 12 bulan hanya dilakukan 7 bulan karena anggaran kegiatan dimulai bulan juni sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran dan tidak ada Perubahan APBD sehingga tidak bisa menggeser anggaran.
11	DPMD	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah anggaran Rp 11.541.312.037,00 Realisasi Rp 10.401.470.156,09 Silpa Rp 1.139.841.880,91 ➤ SELISIH SILPA PALING BANYAK DARI KEGIATAN BERIKUT :

No	Mitra Kerja	Hasil Rapat
		<p>1. KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pagu Rp. 2.600.053.057,00 Realisasi Rp. 2.306.141.248,00 SILPA Rp.293.911.809,00 Alasan : Sisa pagu lebih (SILPA), karena adanya 2 (dua) jabatan yang kosong, sehingga untuk gaji, tunjangan dan TPP tidak bisa direalisasikan.</p> <p>2. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Pagu Rp. 3.986.500.000,00 Realisasi Rp.3.546.805.516,00 SILPA Rp. 439.694.484,00 Alasan : Pagu Rp. 3.986.500.000,00 terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Rp. 3.146.500.000,- (Untuk Pembayaran BPJS Kesehatan bagi Perangkat Desa) sebesar 2.040.374.168,- (1605 perangkat desa). 2. Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 100.000.000,- 3. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa Rp. 265.000.000,- 4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Rp. 50.000.000,- 5. Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Rp. 425.000.000 <p>3. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>

No	Mitra Kerja	Hasil Rapat
		<p>Sub Kegiatan : Peningkatan KapasitasKelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Pagu Rp. 2.037.000.000,00 Realisasi Rp.1.971.605.750,00 SILPA Rp. 65.394.250,00 Alasan : Sisa pagu lebih (SILPA) disebabkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Honor Tim Pelaksana sebesar Rp. 13.850.000,- tidak terserap karena merupakan kegiatan rutin • SPPD dalam Daerah sebesar Rp. 27.380.000,- karena pelaksanaan penyaluran insentif RT yang semula direncanakan 14 hari menjadi 5 hari • Kelebihan belanja sebesar Rp. 24.244.150,00 karena disesuaikan dengan kebutuhan <p>4. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan : Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Pagu Rp. 1.000.000.000,00 Realisasi Rp.938.911.765,00 SILPA Rp. 61.088.235,00 Alasan : Sisa pagu lebih (SILPA) disebabkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Honor Tim Fasilitasi sebesar Rp. 56.350.000,00 tidak terserap karena disesuaikan dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 • Kelebihan Belanja sebesar Rp. 4.738.235,00 karena disesuaikan dengan kebutuhan <p>5. Terkait dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) sesuai dengan hasil koordinasi DPMD Propinsi Jawa Timur untuk pelaksanaan PAW menunggu</p>

No	Mitra Kerja	Hasil Rapat
		<p>Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan PAW dan Pemilihan Kepala Desa. Berkenaan dgn Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak atau PAW untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa di sejumlah desa. Dalam pelaksanaannya masih menunggu petunjuk teknis berupa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Undang-undangnya sudah ada. Namun, Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk teknisnya sampai saat ini belum terbit. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu poin penting dalam perubahan tersebut adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun. Implikasi dari perubahan ini mengharuskan adanya penyesuaian dalam regulasi pelaksanaan, termasuk mekanisme pemilihan dan penanganan calon tunggal.</p> <p>6. Pemilihan Kepala Dusun mengikuti Peraturan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 09 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (SOTK).</p> <p>7. Kegiatan batas desa tahun 2025 adalah penerbitan peraturan bupati tentang batas desa dengan melakukan sosialisasi & harmonisasi ke KEMENHUKAM sebanyak 132 Desa.</p>
12	BPBD	<p>➤ Jumlah Anggaran = 6.772.316.072 Realisasi = 5.096.616.920 SILPA = 1.675.699.152 (SILPA disebabkan oleh adanya kebijakan pembatasan terhadap penyerapan anggaran sebesar 1.360.594.701)</p>
13	DISPENDUK CAPIL	<p>➤ Pagu Rp 7.333.852.404,00 Realisasi Rp 6.368.443.325,00 Silpa Rp 967.733.875,00 (86,80%) Selisih Silpa Paling Banyak Dari Kegiatan Berikut : 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat</p>

No	Mitra Kerja	Hasil Rapat
		<p>Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pagu 3.370.771.019,00 Realisasi 2.966.183.353,00 SILPA 404.587.666,00 Alasan : Sisa lebih dari gaji pokok, TPP ASN, dikarenakan terdapat 4 orang pejabat eselon yang purna tugas pada tahun 2024.</p> <p>2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pagu 981.164.382,00 Realisasi 606.113.900,00 SILPA 375.050.482,00 Alasan: Sisa lebih dari Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, merupakan peralihan dari belanja modal yang akan direalisasikan pada Perubahan APBD, namun karena tidak ada Perubahan APBD maka tidak dapat direalisasikan.</p>
14	SEKRETARIAT DPRD	<p>➤ Jumlah anggaran Rp 42.044.400.451 Realisasi Rp 39.250.893.416 Silpa dan alasan silpa Rp 2.793.507.035 Persentase Serapan Anggaran : (93,36 %)</p> <p>➤ KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pagu 3.673.643.858,00 Realisasi 3.314.913.546,00 SILPA 358.730.312,00 Alasan : Sisa lebih dari gaji pokok, tunj keluarga, beras dan TPP ASN, rencananya digeser ke kegiatan DPRD namun karena tidak ada Perubahan APBD tidak bisa diubah.</p> <p>➤ KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pagu 407.806.800,00 Realisasi 349.098.020,00 SILPA 58.708.780,00 Alasan : Menyesuaikan tagihan</p> <p>➤ KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pagu 472.177.073,00 Realisasi 388.087.536,00 SILPA 84.089.537,00 Alasan : BBM Kendaraan jabatan pimpinan tidak diserap karena jabatan pimpinan sementara tidak dapat</p>

No	Mitra Kerja	Hasil Rapat
		<p>menggunakan fasilitas kendaraan dinas.</p> <p>➤ KEGIATAN LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Pagu 20.954.442.200,00 Realisasi 20.269.724.049,00 SILPA 684.718.151,00 Alasan : Realisasi Tunj Reses 2024 sebanyak 2 kali (anggaran 3 kali) karena sesuai Peraturan Tatib DPRD bahwa masa persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan. Selain itu terdapat sisa lebih dari Tunj keluarga, beras, dll. Tunjangan Perumahan Pimpinan saat menjadi Pimpinan Sementara, direalisasikan sama haknya dengan Tunjangan Perumahan Anggota DPRD.</p> <p>➤ KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan Pagu 181.972.850,00 Realisasi 27.338.000,00 SILPA 154.634.850,00 Alasan : Anggaran pembahasan raperda perubahan APBD tidak terealisasi.</p> <p>➤ KEGIATAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Sub Kegiatan :</p> <p>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</p> <p>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</p> <p>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</p> <p>Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</p> <p>Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.</p> <p>Pagu Total 1.077.088.420,00</p> <p>Realisasi Total 690.210.600,00</p> <p>SILPA 386.877.820,00</p> <p>Alasan : Usulan DPRD terhadap pelaksanaan kunjungan kerja dalam kota yang semula akan digeser ke kegiatan lain, namun karena tidak ada PAK akhirnya direalisasikan 2 bulan (Nop Des). Realiasiasi makan minum rapat sesuai kebutuhan.</p> <p>➤ KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD Sub</p>

No	Mitra Kerja	Hasil Rapat
		Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Pagu 1.267.745.974,00 Realiasi 701.256.785,00 SILPA 566.489.189,00 Alasan : adanya bimtek kegiatan partai yang di rencanakan tapi tidak terlaksana.
15	Camat Se Kabupaten Situbondo	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peran dari Kantor Kecamatan se Kabupaten Situbondo yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang pendelegasian wewenang, maka keberadaan Kantor Kecamatan menjadi garda terdepan dalam menunjang program pemerintahan khususnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) disamping itu peran Kecamatan memiliki fungsi yang strategis untuk mendorong Warga Masyarakat/Pelaku usaha yang ada diwilayah masing-masing dan memberikan fasilitasi untuk mengurus tentang perijinan usaha serta memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak (WP) tentang pelunasan pajak, hal ini menjadi fokus utama dalam menggerakkan roda perekonomian yang ada di desa masing-masing. ➤ Tindak lanjut dari hal tersebut diatas Khususnya di sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) diharapkan kepada masing masing Kecamatan agar membentuk Satgas PBB yang terintegrasi dengan Instansi terkait ditingkat Kecamatan. ➤ Laporan Realisasi dan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun anggaran 2024, terlampir.

- Lampiran Laporan Realisasi dan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun anggaran 2024

**REALISASI DAN PIUTANG PBB
KABUPATEN SITUBONDO
S/D TANGGAL 31 DESEMBER 2024**

KODE	DESA / KELURAHAN	2024					
		WP	BAKU	WP	REALISASI	SISA	(%) Pelunas an
KECAMATAN JATIBANTENG		11.432	248.632.096,00	3.433	63.565.944,00	185.066.152,00	25,57%
35-12-020-001	PATEMON	1.324	36.081.938,00	397	10.360.515,00	25.721.423,00	28,71%
35-12-020-002	KEMBANG SARI	1.604	32.543.406,00	847	16.282.403,00	16.261.003,00	50,03%
35-12-020-003	PATEGALAN	1.507	24.694.482,00	1.507	24.694.482,00	-	100,00%
35-12-020-004	SEMAMBUNG	2.153	46.113.380,00	302	5.359.813,00	40.753.567,00	11,62%
35-12-020-005	SUMBERANYA R	988	22.861.239,00	3	63.642,00	22.797.597,00	0,28%

35-12-020-006	JATIBANTENG	956	20.370.535,00	77	1.654.191,00	18.716.344,00	8,12%
35-12-020-007	WRINGIN ANOM	1.141	22.554.032,00	6	140.397,00	22.413.635,00	0,62%
35-12-020-008	CURAHSURI	1.759	43.413.084,00	294	5.010.501,00	38.402.583,00	11,54%
KECAMATAN BESUKI		15.029	941.036.383,00	7.812,00	502.692.195,00	438.344.188,00	53,42%
35-12-030-004	BLORO	1.357	80.101.042,00	506	29.416.325,00	50.684.717,00	36,72%
35-12-030-005	LANGKAP	837	48.480.656,00	577	32.141.129,00	16.339.527,00	66,30%
35-12-030-006	BLIMBING	1.876	122.597.035,00	1.217	77.059.021,00	45.538.014,00	62,86%
35-12-030-007	WIDORO PAYUNG	1.393	55.941.243,00	338	15.714.078,00	40.227.165,00	28,09%
35-12-030-008	SUMBEREJO	1.245	35.606.713,00	38	1.319.748,00	34.286.965,00	3,71%
35-12-030-009	JETIS	2.057	126.679.110,00	1.466	87.878.023,00	38.801.087,00	69,37%

009							
35-12-030-010	KALIMAS	1.081	40.168.417,00	630	20.972.939,00	19.195.478,00	52,21%
35-12-030-011	DEMUNG	868	85.435.023,00	327	34.922.624,00	50.512.399,00	40,88%
35-12-030-012	PESISIR	1.292	53.392.410,00	729	22.519.550,00	30.872.860,00	42,18%
35-12-030-013	BESUKI	3.023	292.634.734,00	1.984	180.748.758,00	111.885.976,00	61,77%
KECAMATAN BANYUGLUGUR		5.180	620.868.690,00	1.206,00	350.411.073,00	270.457.617,00	56,44%
35-12-031-001	TEPOS	716	21.085.731,00	-	-	21.085.731,00	0,00%
35-12-031-002	SELOBANTEN G	789	41.733.306,00	170	9.550.291,00	32.183.015,00	22,88%
35-12-031-003	TALEMPONG	418	11.159.935,00	16	512.232,00	10.647.703,00	4,59%
35-12-031-004	KALISARI	1.051	35.482.278,00	3	127.184,00	35.355.094,00	0,36%
35-12-	LUBAWANG	235	11.086.413,00	7	284.681,00	10.801.732,00	2,57%

031-005							
35-12-031-006	KALIANGET	1.019	180.249.343,00	528	62.648.207,00	117.601.136,00	34,76%
35-12-031-007	BANYU GLUGUR	952	320.071.684,00	482	277.288.478,00	42.783.206,00	86,63%
KECAMATAN SUBOH		9.827	498.348.978,00	6.070	290.017.727,00	208.331.251,00	58,20%
35-12-040-001	CEMORO	1.712	37.034.498,00	322	4.082.813,00	32.951.685,00	11,02%
35-12-040-002	MOJO DUNGKUL	870	18.141.096,00	870	18.141.096,00	-	100,00%
35-12-040-003	GUNUNG PUTRI	1.614	53.978.060,00	1.614	53.978.060,00	-	100,00%
35-12-040-004	GUNUNG MALANG	1.469	59.166.490,00	1.468	59.153.990,00	12.500,00	99,98%
35-12-040-005	DAWUHAN	1.078	44.843.130,00	505	24.123.561,00	20.719.569,00	53,80%
35-12-040-006	SUBOH	1.232	106.475.627,00	483	44.252.827,00	62.222.800,00	41,56%

35-12-040-007	BUDUAN	686	74.340.510,00	105	24.345.689,00	49.994.821,00	32,75%
35-12-040-008	KETAH	1.166	104.369.567,00	703	61.939.691,00	42.429.876,00	59,35%
KECAMATAN BUNGATAN		9.993	517.481.865,00	4.691	269.447.236,00	248.034.629,00	52,07%
35-12-051-001	SELOWOGO	2.316	78.519.259,00	1.189	40.703.647,00	37.815.612,00	51,84%
35-12-051-002	PATEMON	2.054	62.893.679,00	427	13.120.784,00	49.772.895,00	20,86%
35-12-051-003	SUMBER TENGAH	880	27.877.906,00	410	12.862.177,00	15.015.729,00	46,14%
35-12-051-004	MLANDINGAN WETAN	1.587	81.083.411,00	1.141	60.329.348,00	20.754.063,00	74,40%
35-12-051-005	BLITOK	669	34.690.162,00	23	3.336.057,00	31.354.105,00	9,62%
35-12-051-006	BUNGATAN	1.434	63.473.422,00	702	31.171.836,00	32.301.586,00	49,11%
35-12-051-	PASIR PUTIH	1.053	168.944.026,00	799	107.923.387,00	61.020.639,00	63,88%

007							
KECAMATAN MLANDINGAN		9.456	444.347.690,00	4.670	250.507.237,00	193.840.453,00	56,38%
35-12-050-001	SELOMUKTI	2.439	198.858.729,00	1.277	123.208.221,00	75.650.508,00	61,96%
35-12-050-002	SUMBER PINANG	1.233	44.370.132,00	538	17.467.474,00	26.902.658,00	39,37%
35-12-050-003	ALAS BAYUR	659	10.263.006,00	-	-	10.263.006,00	0,00%
35-12-050-004	SUMBERANYA R	933	17.600.543,00	615	11.382.970,00	6.217.573,00	64,67%
35-12-050-005	CAMPOAN	1.453	29.591.763,00	562	9.896.760,00	19.695.003,00	33,44%
35-12-050-008	TREBUNGAN	1.523	46.947.032,00	1.008	31.153.277,00	15.793.755,00	66,36%
35-12-050-009	MLANDINGAN KULON	1.216	96.716.485,00	670	57.398.535,00	39.317.950,00	59,35%
KECAMATAN KENDIT		10.725	467.499.770,00	3.958	203.643.199,00	263.856.571,00	43,56%
35-12-060-	RAJEK WESI	1.880	53.154.820,00	-	-	53.154.820,00	0,00%

001							
35-12-060-002	TAMBAK UKIR	867	33.967.773,00	132	4.096.888,00	29.870.885,00	12,06%
35-12-060-003	BUGEMAN	856	25.586.526,00	196	6.313.572,00	19.272.954,00	24,68%
35-12-060-004	KENDIT	2.208	77.068.262,00	1.231	39.555.852,00	37.512.410,00	51,33%
35-12-060-005	BALUNG	1.837	65.579.249,00	1.629	57.226.485,00	8.352.764,00	87,26%
35-12-060-006	KUKUSAN	1.212	51.622.051,00	430	17.567.458,00	34.054.593,00	34,03%
35-12-060-007	KLATAKAN	1.865	160.521.089,00	340	78.882.944,00	81.638.145,00	49,14%
KECAMATAN PANARUKAN		14.239	1.215.841.418,00	6.751	734.729.078,00	481.112.340,00	60,43%
35-12-070-001	KILENSARI	1.681	133.376.178,00	443	59.079.167,00	74.297.011,00	44,30%
35-12-070-002	PAOWAN	2.291	100.115.083,00	1.087	47.347.968,00	52.767.115,00	47,29%
35-12-	SUMBERKOLA	4.506	274.592.186,00	2.152	150.588.978,00	124.003.208,00	54,84%

070-003	K						
35-12-070-004	WRINGIN ANOM	2.249	316.712.883,00	1.403	265.722.101,00	50.990.782,00	83,90%
35-12-070-005	PELEYAN	886	137.206.272,00	438	92.006.883,00	45.199.389,00	67,06%
35-12-070-006	ALAS MALANG	777	48.904.810,00	417	21.591.093,00	27.313.717,00	44,15%
35-12-070-007	DUWET	1.091	138.420.521,00	623	77.345.138,00	61.075.383,00	55,88%
35-12-070-008	GELUNG	758	66.513.485,00	188	21.047.750,00	45.465.735,00	31,64%
KECAMATAN SITUBONDO		11.421	1.169.245.230,00	5.448	676.813.915,00	492.431.315,00	57,88%
35-12-080-001	KALIBAGOR	1.075	68.212.668,00	82	7.512.228,00	60.700.440,00	11,01%
35-12-080-002	KOTAKAN	1.447	114.490.071,00	765	56.094.574,00	58.395.497,00	49,00%
35-12-080-003	DAWUHAN	3.092	349.700.081,00	1.587	214.200.827,00	135.499.254,00	61,25%

35-12-080-004	PATOKAN	3.027	383.108.152,00	1.742	250.236.540,00	132.871.612,00	65,32%
35-12-080-005	TALKANDANG	1.707	122.781.734,00	838	57.138.062,00	65.643.672,00	46,54%
35-12-080-006	OLEAN	1.073	130.952.524,00	434	91.631.684,00	39.320.840,00	69,97%
KECAMATAN MANGARAN		5.792	578.645.428,00	2.907	366.042.051,00	212.603.377,00	63,26%
35-12-090-001	TREBUNGAN	1.156	81.124.552,00	265	29.510.179,00	51.614.373,00	36,38%
35-12-090-002	MANGARAN	1.141	81.118.512,00	548	41.612.605,00	39.505.907,00	51,30%
35-12-090-003	TANJUNG KAMAL	1.174	96.200.763,00	557	50.308.579,00	45.892.184,00	52,30%
35-12-090-004	TANJUNG GLUGUR	1.316	75.929.495,00	1.084	55.129.286,00	20.800.209,00	72,61%
35-12-090-005	TANJUNG PECINAN	370	197.476.620,00	180	165.928.821,00	31.547.799,00	84,02%
35-12-090-	SEMIRING	635	46.795.486,00	273	23.552.581,00	23.242.905,00	50,33%

006							
KECAMATAN PANJI		17.773	1.920.175.399,00	7.735	1.126.610.251,00	793.565.148,00	58,67%
35-12-100-001	SLIWUNG	612	36.737.183,00	67	3.416.406,00	33.320.777,00	9,30%
35-12-100-002	ARDIREJO	1.060	100.937.174,00	743	63.570.338,00	37.366.836,00	62,98%
35-12-100-003	BATTAL	1.128	56.706.084,00	391	16.312.559,00	40.393.525,00	28,77%
35-12-100-004	KLAMPOKAN	1.641	61.197.850,00	286	11.890.652,00	49.307.198,00	19,43%
35-12-100-005	JUGLANGAN	984	64.532.797,00	452	28.756.225,00	35.776.572,00	44,56%
35-12-100-006	PANJI KIDUL	933	64.523.862,00	123	10.444.953,00	54.078.909,00	16,19%
35-12-100-007	PANJI LOR	1.001	54.263.373,00	561	28.824.201,00	25.439.172,00	53,12%
35-12-100-008	MIMBAAN	4.535	1.093.781.187,00	2.630	809.647.598,00	284.133.589,00	74,02%
35-12-	CURAHJERU	2.595	177.826.315,00	1.430	88.747.804,00	89.078.511,00	49,91%

100-009							
35-12-100-010	TOKELAN	1.027	70.412.680,00	410	29.490.694,00	40.921.986,00	41,88%
35-12-100-011	TENGGER	1.455	98.664.275,00	312	19.958.156,00	78.706.119,00	20,23%
35-12-100-012	KAYUPUTIH	802	40.592.619,00	330	15.550.665,00	25.041.954,00	38,31%
KECAMATAN KAPONGAN		14.200	944.256.100,00	4.854	372.633.441,00	571.622.659,00	39,46%
35-12-110-001	KANDANG	2.442	131.794.228,00	456	28.103.583,00	103.690.645,00	21,32%
35-12-110-002	CURAH COTOK	807	37.291.689,00	298	14.302.447,00	22.989.242,00	38,35%
35-12-110-003	PELEYAN	1.091	61.170.608,00	224	11.610.151,00	49.560.457,00	18,98%
35-12-110-004	WONOKOYO	1.020	45.245.511,00	241	12.396.877,00	32.848.634,00	27,40%
35-12-110-005	SLETRENG	2.367	171.146.910,00	951	84.679.636,00	86.467.274,00	49,48%

35-12-110-006	LANDANGAN	578	123.158.622,00	122	56.241.377,00	66.917.245,00	45,67%
35-12-110-007	KAPONGAN	706	58.602.088,00	305	24.325.723,00	34.276.365,00	41,51%
35-12-110-008	KESAMBIRAMP AK	1.768	126.594.917,00	554	49.872.228,00	76.722.689,00	39,40%
35-12-110-009	GEBANGAN	1.954	104.527.628,00	1.051	54.569.548,00	49.958.080,00	52,21%
35-12-110-010	POKAAN	1.467	84.723.899,00	652	36.531.871,00	48.192.028,00	43,12%
KECAMATAN SUMBER MALANG		20.866	285.663.890,00	8.686	116.732.056,00	168.931.834,00	40,86%
35-12-111-001	ALAS TENGAH	1.578	24.040.770,00	870	12.022.228,00	12.018.542,00	50,01%
35-12-111-002	BADERAN	1.386	18.475.967,00	748	10.022.337,00	8.453.630,00	54,25%
35-12-111-003	TAMAN KURSI	1.500	19.907.867,00	1.500	19.907.867,00	-	100,00%
35-12-111-	SUMBER ARGO	1.902	26.082.504,00	1.902	26.082.504,00	-	100,00%

004							
35-12-111-005	KALIREJO	3.295	44.534.286,00	2.292	30.032.103,00	14.502.183,00	67,44%
35-12-111-006	TAMAN SARI	3.002	40.474.925,00	728	10.060.608,00	30.414.317,00	24,86%
35-12-111-007	TLOGOSARI	3.819	51.154.992,00	249	3.509.540,00	47.645.452,00	6,86%
35-12-111-008	TAMAN	1.759	25.078.544,00	2	27.300,00	25.051.244,00	0,11%
35-12-111-009	PLALANGAN	2.625	35.914.035,00	395	5.067.569,00	30.846.466,00	14,11%
KECAMATAN ARJASA		9.419	580.339.614,00	3.489	250.675.391,00	329.664.223,00	43,19%
35-12-120-001	CURAH TATAL	1.800	112.151.605,00	242	16.725.096,00	95.426.509,00	14,91%
35-12-120-002	JATISARI	383	29.127.192,00	85	6.488.071,00	22.639.121,00	22,27%
35-12-120-003	KAYUMAS	1.872	91.788.448,00	1.358	63.901.531,00	27.886.917,00	69,62%
35-12-120-004	BAYEMAN	506	22.241.311,00	197	7.778.283,00	14.463.028,00	34,97%

120-004							
35-12-120-005	KETOWAN	2.075	93.212.577,00	962	41.331.501,00	51.881.076,00	44,34%
35-12-120-006	KEDUNG DOWO	1.082	29.578.332,00	110	3.522.427,00	26.055.905,00	11,91%
35-12-120-007	LAMONGAN	725	115.266.350,00	183	78.798.199,00	36.468.151,00	68,36%
35-12-120-008	ARJASA	976	86.973.799,00	352	32.130.283,00	54.843.516,00	36,94%
KECAMATAN JANGKAR		7.275	495.780.489,00	2.578	169.405.137,00	326.375.352,00	34,17%
35-12-130-001	SOPET	1.095	82.461.139,00	161	7.119.254,00	75.341.885,00	8,63%
35-12-130-002	CURAH KALAK	384	33.644.544,00	42	3.514.197,00	30.130.347,00	10,45%
35-12-130-003	PALANGAN	1.951	94.222.066,00	581	16.712.535,00	77.509.531,00	17,74%
35-12-130-004	JANGKAR	1.931	121.403.196,00	1.084	62.545.158,00	58.858.038,00	51,52%

35-12-130-005	GADINGAN	679	37.254.331,00	345	19.138.084,00	18.116.247,00	51,37%
35-12-130-006	KUMBANG SARI	247	16.986.859,00	46	6.757.391,00	10.229.468,00	39,78%
35-12-130-007	PESANGGRAHAN	783	69.265.834,00	295	24.912.499,00	44.353.335,00	35,97%
35-12-130-008	AGEL	205	40.542.520,00	24	28.706.019,00	11.836.501,00	70,80%
KECAMATAN ASEMBAGUS		18.460	1.591.080.937,00	12.073	1.143.035.335,00	448.045.602,00	71,84%
35-12-140-001	MOJOSARI	1.686	131.306.218,00	666	51.161.653,00	80.144.565,00	38,96%
35-12-140-002	KERTOSARI	2.003	145.618.479,00	807	63.712.773,00	81.905.706,00	43,75%
35-12-140-003	KEDUNG LO	1.706	91.740.281,00	1.618	85.989.235,00	5.751.046,00	93,73%
35-12-140-004	BANTAL	2.704	101.396.179,00	2.081	77.416.650,00	23.979.529,00	76,35%
35-12-140-	AWAR-AWAR	1.733	115.540.772,00	1.245	80.513.530,00	35.027.242,00	69,68%

005							
35-12-140-006	PERANTE	1.895	106.789.438,00	1.414	78.720.507,00	28.068.931,00	73,72%
35-12-140-007	TRIGONCO	1.176	355.330.908,00	451	306.658.690,00	48.672.218,00	86,30%
35-12-140-008	ASEMBAGUS	1.663	132.337.161,00	1.293	97.436.751,00	34.900.410,00	73,63%
35-12-140-009	GUDANG	1.336	128.274.733,00	568	75.910.643,00	52.364.090,00	59,18%
35-12-140-010	WRINGIN ANOM	2.558	282.746.768,00	1.930	225.514.903,00	57.231.865,00	79,76%
KECAMATAN BANYUPUTIH		12.979	775.127.319,00	8.295	507.430.079,00	267.697.240,00	65,46%
35-12-150-001	BANYUPUTIH	1.713	131.952.771,00	1.057	86.587.748,00	45.365.023,00	65,62%
35-12-150-002	SUMBEREJO	2.856	172.826.822,00	1.423	94.856.382,00	77.970.440,00	54,89%
35-12-150-003	SUMBERANYAR	3.139	180.212.041,00	1.671	98.378.047,00	81.833.994,00	54,59%
35-12-	WONOREJO	2.865	136.033.818,00	2.287	107.182.521,00	28.851.297,00	78,79%

150-004							
35-12-150-005	SUMBER WARU	2.406	154.101.867,00	1.857	120.425.381,00	33.676.486,00	78,15%
	SEKABUPATE N	204.066	13.294.371.296,00	94.656	7.394.391.345,00	5.899.979.951,00	55,62%

KOMISI II

No	Mitra Kerja	Hasil Rapat
1	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo	<p>Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 301.036.520.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 271.677.463.608</p> <p>Tidak terlampauinya target PAD Realisasi Pajak Daerah 64.907.480.484 sekitar 71 % , Tidak terlampauinya target sebesar 90.939.883.159</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Perlu Trobosan yang kongkrit untuk meningkatkan kesadaran para pemilik usaha untuk taat bayar pajak sesuai regulasi Ex. Dinas pendapatan agar memasang Bannar pemberitahuan taat pajak , memberikan Reward ke pemilik usaha yang taat pajak • Pemerintah Daerah Perlu adanya daya rangsang kesejahteraan guna meminialisir penyimpangan pajak dan retribusi pada ➢ Perlu mendapat pembekalan / Bintek dalam mendukung Pekerjaan Pemerintah Daerah untuk mendukung prasarana di bapemda sebagai koordinator OPD penghasil pendapatan
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temuan BPK Terkait dengan kejelasan Status 65 kendaraan bermotor senilai 289 juta dan 2 Unit Kendaraan Perumda eks. Banongan Temuan BPK Sebanyak (8 Barang Milik Daerah senilai kurang lebih 10 M dihibahkan kepada pihak lain masih belum dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah • Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan khususnya di Perumda eks. Banongan untuk merubah Kontrak sewa lahan tanam Melon semula per panen / 4 bulan menjadi 1 Tahun dengan 2 kali pembayaran, agar proyeksi potensi PAD di ketahui. • Sisa lahan di Perumda eks. Banongan yang belum disewa oleh petani , komisi II Merokomendasikan untuk di sewakan pada pelaku petani Melon Lokal maupun Non lokal agar menyerap tenaga kerja dilingkungan sekitar, sehingga petani Non Lokal bisa transfer Tehnologi pada petani lokal. • Potensi pendapatan di Perumda eks. Banongan yang hilang dan serapan tenaga kerja yang berkurang dari tanah sewa yang ditanam melon menjadi tebu. <p>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk</p>

No	Mitra Kerja	Hasil Rapat
		membuat papan pengumuman di area Perumda eks. Banongan (Luas eks. Banongan keseluruhan, lahan yang disewa melon, Tebu dll beserta PAD yang didapat per tahun) agar masyarakat mengetahui potensi PAD di Kabupaten Situbondo.
3	Dinas Peternakan dan Perikanan	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Terlampaunya target Retribusi daerah dari Rp 1.025.510.683,00 terealisasi Rp704.162.360,00 • Potensi yang ada di setiap UPT Dinas Peternakan dan Perikanan untuk dinaikkan guna meningkatkan PAD <p>Dinas Peternakan dan Perikanan untuk bekerja sama dengan Dinas Pendidikan (Sekolah Negeri / Swata) agar meningkatkan minat dan potensi pengolahan Peternakan dan Perikanan menjadi peluang dimasa yang akan datang</p>
4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eks. Perumda Pasir Putih Target PAD 2023 dan 2024 telah tercapai dg baik, dibanding pada saat BUMD. <p>Kesejahteraan karyawan harus diperhatikan.</p>
5	Badan Keuangan Aset Daerah	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tindak lanjut atas temuan BPK dalam penghapusan 12.333 BMD tahun 2022-2024 yang belum ditindaklanjuti <p>Perbaikan dalam tata kelola terutama dalam inventarisasi serta optimalisasi aset untuk PAD</p>
6	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam pengelolaan retribusi pelayanan Pasar masih belum tertib dan sesuai dengan ketentuan tariff terbaru sehingga terdapat potensi kehilangan pendapatan sekitar 3, 2 M (Potensi Sebenarnya 5,6 M sedangkan Realisasi 2, 3 M). • Belum adanya petunjuk teknis pemungutan retribusi pelayanan pasar sejak diberlakukan perda yang baru Perda No 7 tahun 2023 <p>Terdapat pengelolaan aset milik diskoperindag senilai 322 juta yang digunakan oleh pihak lain tanpa surat kepala daerah</p>
7	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam , PDAM & BPRS	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagian Perekonomian agar mempercepat Proses seleksi Pimpinan di BPRS dan PDAM untuk mendukung kegiatan Operasional dan Adminitrasi di masing masing Prumda. • PDAM agar merubah manajemen dari Pendapatan Global menjadi pengelolaan PDAM

No	Mitra Kerja	Hasil Rapat
		dan pengelolaan Air Kemasan Untuk mengetahui progres peningkatan PAD sebelum ada pengelolaan Air Kemasan.

KOMISI III

No	Mitra Kerja	Hasil Rapat																																																																				
1	Dinas Komunikasi Informatika	<div>Tabel 2 - 22 Belanja Urusan Wajib Bidang komunikasi dan Informatika Tahun 2024</div> <table><tr><th>No</th><th>Program</th><th>Anggaran</th><th>Realisasi</th></tr><tr><td>2.16.01</td><td>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</td><td>8.240.814.157,00</td><td>7.364,6</td></tr><tr><td>2.16.02</td><td>Program Informasi Dan Komunikasi Publik</td><td>6.129.857.797,00</td><td>3.872,4</td></tr><tr><td>2.16.03</td><td>Program Aplikasi Informatika</td><td>454.516.315,00</td><td>194,0</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>14.855.188.269,00</td><td>11.431,0</td></tr></table> <div><table><tr><th></th><th>Anggaran di Perda</th><th>Anggaran di Raperda</th><th>Realisasi di Raperda</th><th></th><th></th></tr><tr><td>Dinas Kominfo</td><td>19.003.942.669</td><td>14.855.188.269</td><td>11.431.030.386</td><td>Lebih Kecil</td><td>4.148</td></tr><tr><td>Belanja Operasi</td><td>15.891.406.442</td><td>12.747.209.222</td><td>10.994.227.680</td><td>Lebih Kecil</td><td>2.144</td></tr><tr><td>Belanja Modal</td><td>3.112.536.247</td><td>1.107.979.047</td><td>436.802.705</td><td>Lebih Kecil</td><td>2.004</td></tr></table></div> <div>Evaluasi yang dilakukan:</div> <div><div>1. Kesesuaian: antara Raperda dengan Perda APBD 2024. Kesesuaian dengan temuan laporan hasil pemeriksaan BPK. (Pasal 7)</div><div>2. (Pasal 8), berkenaan dengan:<div><div>a. Evaluasi Konsistensi : sesuai pagu, numenklatur, struktur & klasifikasi.</div><div>b. Evaluasi Kebijakan: menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD.</div><div>c. Evaluasi Legalitas: landasan yuridis penyusunan, penyajian informasi dalam Raperda</div></div></div></div>	No	Program	Anggaran	Realisasi	2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.240.814.157,00	7.364,6	2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	6.129.857.797,00	3.872,4	2.16.03	Program Aplikasi Informatika	454.516.315,00	194,0	Jumlah		14.855.188.269,00	11.431,0		Anggaran di Perda	Anggaran di Raperda	Realisasi di Raperda			Dinas Kominfo	19.003.942.669	14.855.188.269	11.431.030.386	Lebih Kecil	4.148	Belanja Operasi	15.891.406.442	12.747.209.222	10.994.227.680	Lebih Kecil	2.144	Belanja Modal	3.112.536.247	1.107.979.047	436.802.705	Lebih Kecil	2.004																								
No	Program	Anggaran	Realisasi																																																																			
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.240.814.157,00	7.364,6																																																																			
2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	6.129.857.797,00	3.872,4																																																																			
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	454.516.315,00	194,0																																																																			
Jumlah		14.855.188.269,00	11.431,0																																																																			
	Anggaran di Perda	Anggaran di Raperda	Realisasi di Raperda																																																																			
Dinas Kominfo	19.003.942.669	14.855.188.269	11.431.030.386	Lebih Kecil	4.148																																																																	
Belanja Operasi	15.891.406.442	12.747.209.222	10.994.227.680	Lebih Kecil	2.144																																																																	
Belanja Modal	3.112.536.247	1.107.979.047	436.802.705	Lebih Kecil	2.004																																																																	
2	Dinas Lingkungan Hidup	<div>Tabel 2 - 17 Belanja Urusan Wajib Lingkungan Hidup Tahun 2024</div> <table><tr><th>No</th><th>Program</th><th>Anggaran</th><th>Realisasi</th></tr><tr><td>2.11.01</td><td>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</td><td>25.910.995.859,00</td><td>23.092.333,1</td></tr><tr><td>2.11.02</td><td>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</td><td>289.554.600,00</td><td>261.343,2</td></tr><tr><td>2.11.03</td><td>Program Pengendalian Pencemaran Dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup</td><td>2.824.062.000,00</td><td>2.229.989,1</td></tr><tr><td>2.11.04</td><td>Program Pengelolaan Keselamatan Hayati (KEHATI)</td><td>3.810.060.000,00</td><td>3.610.525,2</td></tr><tr><td>2.11.05</td><td>Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)</td><td>25.000.000,00</td><td>-</td></tr><tr><td>2.11.06</td><td>Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</td><td>18.370.000,00</td><td>14.869,1</td></tr><tr><td>2.11.09</td><td>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</td><td>113.000.000,00</td><td>58.803,1</td></tr><tr><td>2.11.10</td><td>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</td><td>54.344.200,00</td><td>21.146,1</td></tr><tr><td>2.11.11</td><td>Program Pengelolaan Sampah</td><td>2.748.937.794,00</td><td>1.367.930,2</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>35.794.214.153,00</td><td>30.657.941,2</td></tr></table> <div>Selisih lebih : 5.126.272.750,44</div> <div><table><tr><th></th><th>Anggaran di Perda</th><th>Anggaran di Raperda</th><th>Realisasi di Raperda</th><th></th><th></th></tr><tr><td>Dinas LH</td><td>37.784.204.220</td><td>35.794.214.133</td><td>30.657.941.409</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Belanja Operasi</td><td>29.820.485.710</td><td>28.620.485.710</td><td>25.134.320.219</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Belanja Modal</td><td>8.963.718.510</td><td>7.173.728.423</td><td>5.523.621.189</td><td>-</td><td>-</td></tr></table></div> <div>Catatan:</div> <div>- Besar Anggaran pada Perda APBD dengan Anggaran</div>	No	Program	Anggaran	Realisasi	2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.910.995.859,00	23.092.333,1	2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	289.554.600,00	261.343,2	2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.824.062.000,00	2.229.989,1	2.11.04	Program Pengelolaan Keselamatan Hayati (KEHATI)	3.810.060.000,00	3.610.525,2	2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	25.000.000,00	-	2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	18.370.000,00	14.869,1	2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	113.000.000,00	58.803,1	2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	54.344.200,00	21.146,1	2.11.11	Program Pengelolaan Sampah	2.748.937.794,00	1.367.930,2	Jumlah		35.794.214.153,00	30.657.941,2		Anggaran di Perda	Anggaran di Raperda	Realisasi di Raperda			Dinas LH	37.784.204.220	35.794.214.133	30.657.941.409	-	-	Belanja Operasi	29.820.485.710	28.620.485.710	25.134.320.219	-	-	Belanja Modal	8.963.718.510	7.173.728.423	5.523.621.189	-	-
No	Program	Anggaran	Realisasi																																																																			
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.910.995.859,00	23.092.333,1																																																																			
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	289.554.600,00	261.343,2																																																																			
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.824.062.000,00	2.229.989,1																																																																			
2.11.04	Program Pengelolaan Keselamatan Hayati (KEHATI)	3.810.060.000,00	3.610.525,2																																																																			
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	25.000.000,00	-																																																																			
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	18.370.000,00	14.869,1																																																																			
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	113.000.000,00	58.803,1																																																																			
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	54.344.200,00	21.146,1																																																																			
2.11.11	Program Pengelolaan Sampah	2.748.937.794,00	1.367.930,2																																																																			
Jumlah		35.794.214.153,00	30.657.941,2																																																																			
	Anggaran di Perda	Anggaran di Raperda	Realisasi di Raperda																																																																			
Dinas LH	37.784.204.220	35.794.214.133	30.657.941.409	-	-																																																																	
Belanja Operasi	29.820.485.710	28.620.485.710	25.134.320.219	-	-																																																																	
Belanja Modal	8.963.718.510	7.173.728.423	5.523.621.189	-	-																																																																	

No	Mitra Kerja	Hasil Rapat																												
		pada Raperda LKPJ: Sama.																												
3	Bagian Ekonomi dan Pembangunan	<table><tr><th></th><th>Anggaran di Perda</th><th>Anggaran di Raperda</th><th>Realisasi di Raperda</th><th></th></tr><tr><td>Sekretaris Daerah</td><td>52.200.787.324</td><td>52.957.643.811</td><td>42.857.556.477</td><td>Lebih Bes</td></tr><tr><td>Belanja Operasi</td><td>48.983.279.701</td><td>49.540.114.188</td><td>40.516.567.018</td><td>Lebih Bes</td></tr><tr><td>Belanja Modal</td><td>3.217.527.623</td><td>3.417.527.623</td><td>2.340.989.459</td><td>Lebih Bes</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">SELISIH ANGGARAN</th></tr><tr><td>Dinas</td><td>756.854.487</td></tr><tr><td>Belanja Operasi</td><td>558.854.487</td></tr><tr><td>Belanja Modal</td><td>200.000.000</td></tr></table> <p>Evaluasi yang dilakukan sesuai:</p> <ol style="list-style-type: none">Kesesuaian: antara Raperda dengan Perda APBD 2024. Kesesuaian dengan temuan laporan hasil pemeriksaan BPK. (Pasal 7)(Pasal 8), berkenaan dengan:Evaluasi Konsistensi : ada ketidaksesuaian pagu, numenklatur, struktur &klasifikasi.Evaluasi Kebijakan: menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD.Evaluasi Legalitas: landasan yuridis penyusunan, penyajian informasi dalam Raperda.		Anggaran di Perda	Anggaran di Raperda	Realisasi di Raperda		Sekretaris Daerah	52.200.787.324	52.957.643.811	42.857.556.477	Lebih Bes	Belanja Operasi	48.983.279.701	49.540.114.188	40.516.567.018	Lebih Bes	Belanja Modal	3.217.527.623	3.417.527.623	2.340.989.459	Lebih Bes	SELISIH ANGGARAN		Dinas	756.854.487	Belanja Operasi	558.854.487	Belanja Modal	200.000.000
	Anggaran di Perda	Anggaran di Raperda	Realisasi di Raperda																											
Sekretaris Daerah	52.200.787.324	52.957.643.811	42.857.556.477	Lebih Bes																										
Belanja Operasi	48.983.279.701	49.540.114.188	40.516.567.018	Lebih Bes																										
Belanja Modal	3.217.527.623	3.417.527.623	2.340.989.459	Lebih Bes																										
SELISIH ANGGARAN																														
Dinas	756.854.487																													
Belanja Operasi	558.854.487																													
Belanja Modal	200.000.000																													
4	Pengadaan Barang dan Jasa	<table><tr><th></th><th>Anggaran di Perda</th><th>Anggaran di Raperda</th><th>Realisasi di Raperda</th><th></th></tr><tr><td>Sekretaris Daerah</td><td>52.200.787.324</td><td>52.957.643.811</td><td>42.857.556.477</td><td>Lebih Bes</td></tr><tr><td>Belanja Operasi</td><td>48.983.279.701</td><td>49.540.114.188</td><td>40.516.567.018</td><td>Lebih Bes</td></tr><tr><td>Belanja Modal</td><td>3.217.527.623</td><td>3.417.527.623</td><td>2.340.989.459</td><td>Lebih Bes</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">SELISIH ANGGARAN</th></tr><tr><td>Dinas</td><td>756.854.487</td></tr><tr><td>Belanja Operasi</td><td>558.854.487</td></tr><tr><td>Belanja Modal</td><td>200.000.000</td></tr></table> <p>Evaluasi yang dilakukan sesuai:</p> <ol style="list-style-type: none">Kesesuaian: antara Raperda dengan Perda APBD 2024. Kesesuaian dengantemuan laporan hasil pemeriksaan BPK. (Pasal 7)(Pasal 8), berkenaan dengan:<ol style="list-style-type: none">Evaluasi Konsistensi : ada ketidaksesuaian pagu, numenklatur, struktur & klasifikasi.Evaluasi Kebijakan: menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD.Evaluasi Legalitas: landasan yuridis penyusunan, penyajian informasi dalam Raperda		Anggaran di Perda	Anggaran di Raperda	Realisasi di Raperda		Sekretaris Daerah	52.200.787.324	52.957.643.811	42.857.556.477	Lebih Bes	Belanja Operasi	48.983.279.701	49.540.114.188	40.516.567.018	Lebih Bes	Belanja Modal	3.217.527.623	3.417.527.623	2.340.989.459	Lebih Bes	SELISIH ANGGARAN		Dinas	756.854.487	Belanja Operasi	558.854.487	Belanja Modal	200.000.000
	Anggaran di Perda	Anggaran di Raperda	Realisasi di Raperda																											
Sekretaris Daerah	52.200.787.324	52.957.643.811	42.857.556.477	Lebih Bes																										
Belanja Operasi	48.983.279.701	49.540.114.188	40.516.567.018	Lebih Bes																										
Belanja Modal	3.217.527.623	3.417.527.623	2.340.989.459	Lebih Bes																										
SELISIH ANGGARAN																														
Dinas	756.854.487																													
Belanja Operasi	558.854.487																													
Belanja Modal	200.000.000																													
5	Dinas Perhubungan	<p>Tabel 2 - 21 Belanja Urusan Wajib Bidang Perhubungan Tahun 2024</p> <table><tr><th>No</th><th>Program</th><th>Anggaran</th><th>Real</th></tr><tr><td>2.15.01</td><td>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</td><td>32.087.881.066,00</td><td>29.626,0</td></tr><tr><td>2.15.02</td><td>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llj)</td><td>39.505.855.260,00</td><td>29.415,0</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>71.593.736.326,00</td><td>59.041,0</td></tr></table> <p>Catatan: - Terdapat perbedaan Anggaran pada PERDA APBD:</p>	No	Program	Anggaran	Real	2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.087.881.066,00	29.626,0	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llj)	39.505.855.260,00	29.415,0	Jumlah		71.593.736.326,00	59.041,0												
No	Program	Anggaran	Real																											
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.087.881.066,00	29.626,0																											
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llj)	39.505.855.260,00	29.415,0																											
Jumlah		71.593.736.326,00	59.041,0																											

N o	Mitra Kerja	Hasil Rapat																																																
		<p>➤ 2.15.02: 35.082.000.000,-</p> <table><tr><th></th><th>Anggaran di Perda</th><th>Anggaran di Raperda</th><th>Realisasi di Raperda</th><th></th><th></th></tr><tr><td>Data Perhitungan</td><td>67.169.881.066</td><td>71.593.736.326</td><td>59.041.844.222</td><td>Lebih Besar</td><td>4.437</td></tr><tr><td>Belanja Operan</td><td>35.316.954.944</td><td>35.646.854.844</td><td>31.669.938.031</td><td>Lebih Besar</td><td>132</td></tr><tr><td>Belanja Modal</td><td>31.852.926.122</td><td>35.946.881.502</td><td>27.371.906.191</td><td>Lebih Besar</td><td>4.297</td></tr></table> <p>Evaluasi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kesesuaian: antara Raperda dengan Perda APBD 2024. Kesesuaian dengan temuan laporan hasil pemeriksaan BPK. (Pasal 7)2. (Pasal 8), berkenaan dengan:<ol style="list-style-type: none">a. Evaluasi Konsistensi : ada ketidaksesuaian pagu, numenklatur, struktur & klasifikasi.b. Evaluasi Kebijakan: menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD.c. Evaluasi Legalitas: landasan yuridis penyusunan, penyajian informasi dalam Raperda.		Anggaran di Perda	Anggaran di Raperda	Realisasi di Raperda			Data Perhitungan	67.169.881.066	71.593.736.326	59.041.844.222	Lebih Besar	4.437	Belanja Operan	35.316.954.944	35.646.854.844	31.669.938.031	Lebih Besar	132	Belanja Modal	31.852.926.122	35.946.881.502	27.371.906.191	Lebih Besar	4.297																								
	Anggaran di Perda	Anggaran di Raperda	Realisasi di Raperda																																															
Data Perhitungan	67.169.881.066	71.593.736.326	59.041.844.222	Lebih Besar	4.437																																													
Belanja Operan	35.316.954.944	35.646.854.844	31.669.938.031	Lebih Besar	132																																													
Belanja Modal	31.852.926.122	35.946.881.502	27.371.906.191	Lebih Besar	4.297																																													
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<p>Tabel 2 - 39 Belanja Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Tahun</p> <table><tr><th>No</th><th>Program</th><th>Anggaran</th><th>Real</th></tr><tr><td>5.01</td><td>PERENCANAAN</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.01.01</td><td>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</td><td>6.893.008.209,00</td><td>7.099.67</td></tr><tr><td>5.01.02</td><td>Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</td><td>2.514.130.392,00</td><td>1.874.27</td></tr><tr><td>5.01.03</td><td>Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</td><td>2.290.210.520,00</td><td>1.501.53</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>13.697.349.121,00</td><td>10.475.48</td></tr></table> <p>Catatan:</p> <p>- Terdapat perbedaan Anggaran pada PERDA APBD: 5.01.02: 3.221.860.060,00</p> <table><tr><th></th><th>Anggaran di Perda</th><th>Anggaran di Raperda</th><th>Realisasi di Raperda</th><th></th><th></th></tr><tr><td>Raperda</td><td>33.854.998.401</td><td>33.657.349.121</td><td>33.471.489.361</td><td>Lebih Kecil</td><td>-187.8</td></tr><tr><td>Belanja Operan</td><td>33.482.107.039</td><td>33.294.857.519</td><td>30.139.543.984</td><td>Lebih Kecil</td><td>-318.8</td></tr><tr><td>Belanja Modal</td><td>402.891.361</td><td>402.891.361</td><td>344.945.377</td><td></td><td></td></tr></table> <p>Evaluasi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kesesuaian: antara Raperda dengan Perda APBD 2024. Kesesuaian dengan temuan laporan hasil pemeriksaan BPK. (Pasal 7)2. (Pasal 8), berkenaan dengan:<ol style="list-style-type: none">a. Evaluasi Konsistensi : ada ketidaksesuaian pagu, numenklatur, struktur & klasifikasi.b. Evaluasi Kebijakan: menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD.c. Evaluasi Legalitas: landasan yuridis penyusunan, penyajian informasi dalam Raperda.	No	Program	Anggaran	Real	5.01	PERENCANAAN			5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.893.008.209,00	7.099.67	5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.514.130.392,00	1.874.27	5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.290.210.520,00	1.501.53	Jumlah		13.697.349.121,00	10.475.48		Anggaran di Perda	Anggaran di Raperda	Realisasi di Raperda			Raperda	33.854.998.401	33.657.349.121	33.471.489.361	Lebih Kecil	-187.8	Belanja Operan	33.482.107.039	33.294.857.519	30.139.543.984	Lebih Kecil	-318.8	Belanja Modal	402.891.361	402.891.361	344.945.377		
No	Program	Anggaran	Real																																															
5.01	PERENCANAAN																																																	
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.893.008.209,00	7.099.67																																															
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.514.130.392,00	1.874.27																																															
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.290.210.520,00	1.501.53																																															
Jumlah		13.697.349.121,00	10.475.48																																															
	Anggaran di Perda	Anggaran di Raperda	Realisasi di Raperda																																															
Raperda	33.854.998.401	33.657.349.121	33.471.489.361	Lebih Kecil	-187.8																																													
Belanja Operan	33.482.107.039	33.294.857.519	30.139.543.984	Lebih Kecil	-318.8																																													
Belanja Modal	402.891.361	402.891.361	344.945.377																																															

No	Mitra Kerja	Hasil Rapat																																																				
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman	<table><tr><th colspan="4">Tabel 2 - 9 Belanja Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024</th></tr><tr><th>No</th><th>Program</th><th>Anggaran</th><th>Realisasi</th></tr><tr><td>1.03.01</td><td>Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</td><td>17.283.746.524,00</td><td>15.223.044.513,</td></tr><tr><td>1.03.02</td><td>Program pengelolaan sumber daya air (SDA)</td><td>29.670.177.000,00</td><td>22.667.484.027,</td></tr><tr><td>1.03.03</td><td>Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum</td><td>10.867.328.632,00</td><td>8.922.128.417,</td></tr><tr><td>1.03.05</td><td>Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah</td><td>16.385.528.000,00</td><td>16.027.028.150,</td></tr><tr><td>1.03.06</td><td>Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase</td><td>6.876.253.338,00</td><td>3.548.741.998,</td></tr><tr><td>1.03.07</td><td>Program pengembangan permukiman</td><td>0,00</td><td>0,</td></tr><tr><td>1.03.08</td><td>Program penataan bangunan gedung</td><td>35.531.950.437,00</td><td>32.973.004.021,</td></tr><tr><td>1.03.10</td><td>Program penyelenggaraan jalan</td><td>127.412.448.669,00</td><td>106.035.031.188,</td></tr><tr><td>1.03.11</td><td>Program pengembangan jasa konstruksi</td><td>625.000.000,00</td><td>633.668.642,</td></tr><tr><td>1.03.12</td><td>Program penyelenggaraan penataan ruang</td><td>4.080.000.000,00</td><td>3.353.755.066,</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>249.032.432.600,00</td><td>209.383.884.234,</td></tr></table>	Tabel 2 - 9 Belanja Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024				No	Program	Anggaran	Realisasi	1.03.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	17.283.746.524,00	15.223.044.513,	1.03.02	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	29.670.177.000,00	22.667.484.027,	1.03.03	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	10.867.328.632,00	8.922.128.417,	1.03.05	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	16.385.528.000,00	16.027.028.150,	1.03.06	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	6.876.253.338,00	3.548.741.998,	1.03.07	Program pengembangan permukiman	0,00	0,	1.03.08	Program penataan bangunan gedung	35.531.950.437,00	32.973.004.021,	1.03.10	Program penyelenggaraan jalan	127.412.448.669,00	106.035.031.188,	1.03.11	Program pengembangan jasa konstruksi	625.000.000,00	633.668.642,	1.03.12	Program penyelenggaraan penataan ruang	4.080.000.000,00	3.353.755.066,	Jumlah		249.032.432.600,00	209.383.884.234,
		Tabel 2 - 9 Belanja Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024																																																				
		No	Program	Anggaran	Realisasi																																																	
		1.03.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	17.283.746.524,00	15.223.044.513,																																																	
		1.03.02	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	29.670.177.000,00	22.667.484.027,																																																	
		1.03.03	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	10.867.328.632,00	8.922.128.417,																																																	
		1.03.05	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	16.385.528.000,00	16.027.028.150,																																																	
		1.03.06	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	6.876.253.338,00	3.548.741.998,																																																	
		1.03.07	Program pengembangan permukiman	0,00	0,																																																	
		1.03.08	Program penataan bangunan gedung	35.531.950.437,00	32.973.004.021,																																																	
		1.03.10	Program penyelenggaraan jalan	127.412.448.669,00	106.035.031.188,																																																	
		1.03.11	Program pengembangan jasa konstruksi	625.000.000,00	633.668.642,																																																	
1.03.12	Program penyelenggaraan penataan ruang	4.080.000.000,00	3.353.755.066,																																																			
Jumlah		249.032.432.600,00	209.383.884.234,																																																			
Catatan:																																																						
- Besar Anggaran pada Perda APBD dengan Anggaran pada Raperda LKPJ:																																																						
Sama.																																																						
- Terdapat perbedaan Anggaran pada PERDA APBD:																																																						
a) 1.03.01: 17.248.746.524																																																						
b) 1.03.02: 24.670.013.000,-																																																						
c) 1.03.03: 13.334.036.000,-																																																						
d) 1.03.06: 8.330.000.000,-																																																						
e) 1.03.08: 24.562.681,103,-																																																						
f) 1.03.10: 122.551.881.000,-																																																						
<table><tr><th></th><th>Anggaran D Perda</th><th>Anggaran D Raperda</th><th>Realisasi D Raperda</th><th>Lebar Dasar</th><th></th></tr><tr><td>Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman</td><td>112.087.655.827</td><td>249.032.432.600</td><td>209.383.884.234</td><td>Lebar Dasar</td><td>209.383.884.234</td></tr><tr><td>Bekas Dinas Cendek</td><td>62.986.218.201</td><td>60.588.008.819</td><td>43.880.777.473</td><td>Lebar Rapi</td><td>1.400.201</td></tr><tr><td>Bekas Dinas Mode</td><td>188.121.989.235</td><td>188.408.423.781</td><td>155.403.106.761</td><td>Lebar Rapi</td><td>15.244.71</td></tr></table>			Anggaran D Perda	Anggaran D Raperda	Realisasi D Raperda	Lebar Dasar		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman	112.087.655.827	249.032.432.600	209.383.884.234	Lebar Dasar	209.383.884.234	Bekas Dinas Cendek	62.986.218.201	60.588.008.819	43.880.777.473	Lebar Rapi	1.400.201	Bekas Dinas Mode	188.121.989.235	188.408.423.781	155.403.106.761	Lebar Rapi	15.244.71																													
	Anggaran D Perda	Anggaran D Raperda	Realisasi D Raperda	Lebar Dasar																																																		
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman	112.087.655.827	249.032.432.600	209.383.884.234	Lebar Dasar	209.383.884.234																																																	
Bekas Dinas Cendek	62.986.218.201	60.588.008.819	43.880.777.473	Lebar Rapi	1.400.201																																																	
Bekas Dinas Mode	188.121.989.235	188.408.423.781	155.403.106.761	Lebar Rapi	15.244.71																																																	
Evaluasi yang dilakukan:																																																						
1. Kesesuaian: antara Raperda dengan Perda APBD 2024. Kesesuaian dengan temuan laporan hasil pemeriksaan BPK. (Pasal 7)																																																						
2. (Pasal 8), berkenaan dengan:																																																						
a. Evaluasi Konsistensi : ada ketidaksesuaian pagu, numenklatur, struktur & klasifikasi.																																																						
b. Evaluasi Kebijakan: menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD.																																																						
c. Evaluasi Legalitas: landasan yuridis penyusunan, penyajian informasi dalam Raperda.																																																						
Demikian berita acara hasil rapat bersama Komisi III Kab. Situbondo dengan mitra kerja, dibuat dengan sebaik-baiknya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.																																																						

KOMISI IV

No	Mitra Kerja	Hasil Rapat
1	DP3AP2KB	<p>Pada hari Senin, 19 Mei 2025</p> <p>Serapan Anggaran 91 %</p> <p>Tidak dapat di serap 100% dikarenakan ada beberapa pergeseran yang tidak bisa dilakukan.</p> <p>Pagu anggaran : 19.531.000.000,-</p> <p>Pagu di Raperda di APBD Rp. 17.803.000.000,-</p> <p>Realisasi Rp. 17.798.000.000,-</p> <p>Ada selisih kisaran 5 juta lebih ternyata ada pengembalian di gaji pegawai akan tetapi sudah dikembalikan.</p>
2	KESRA	<p>Pada hari Senin 19 Mei 2025</p> <p>Pagu Anggaran : 10 M lebih</p> <p>Realisasi : 8.544.876.474</p> <p>Silpa Rp.1,6 M mencakup pemberangkatan dan penjemputan jamaah haji termasuk di MTQ dan Pengajian.</p> <p>Di tahun 2025 akan terjadi kekurangan Anggaran Jemaah Haji dikarenakan ada kelebihan Kloter</p> <p>Catatan :</p> <p>Minta Laporan tertulis terkait Silpa :</p> <p>Fasilitasi Bina Mental</p> <p>Pelaksanaan kebijakan terkait kesejahteraan social</p> <p>Fasilitasi Koordinasi Hukum</p>
3	DINAS SOSIAL	<p>Pada hari Senin, 19 Mei 2025</p> <p>Pagu Anggaran : 14.201.448.381</p> <p>Realisasi :10.057.933.935</p> <p>Sisa Pagu Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DBHCHT Rp.2.500.000.000 - Fasilitasi Bantuan Sosial Rp.43.266.188 - Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Rp.100.957.500,- - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Rp.58.591.185 - Penanganan Korban Bencana Alam Rp.217.887.700 - Penyelenggaraan Pemberdayaan terhadap Kesiapan siagaan Bencana Kab/Kota Rp.119.743.800 <p>Catatan :</p> <p>Rehabilitasi Sosial perlu di koordinasikan bersama Komisi IV</p>
4	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	<p>Pada hari Senin, 19 Mei 2025</p> <p>Pagu Anggaran : Rp.5.055.570.571</p> <p>Realisasi : Rp.4.090.056.109</p> <p>Silpa : Rp.966.968.314</p> <p>Terkait Study Banding ke DKI Jakarta yang kita</p>

No	Mitra Kerja	Hasil Rapat
		dapat adalah Sarana dan Prasarana di DKI Jakarta sangatlah luar biasa penganggarannya dan fasilitas Perpustakaan di Jakarta sangatlah Bagus sekali, kedepan kami dan keinginan Bupati akan membangun Gedung Perpustakaan yang Bagus dan nyaman untuk Masyarakat situbondo agar lebih gemar untuk membaca serta ingin Masyarakat Situbondo khususnya untuk lebih tertarik untuk mengunjungi Perpustakaan.
5	DINAS KESEHATAN	<p>Pada hari Selasa, 20 Mei 2025 Pagu Anggaran : Rp.363.900.779.628 Realisasi : Rp.352.588.323.050 Silpa : Rp.11.312.456.577 dikarenakan efisiensi anggaran, tidak adanya PAPBD, karena waktu tidak mencukupi, kesalahn rekening dan beberapa temuan.</p> <p>Catatan : Tidak ada kesesuaian antara anggaran yang diperda sama yang dipaparkan kepala Dinkes.</p>
6	RSAR SITUBONDO	<p>Pada hari Selasa, 20 Mei 2025 Pagu Anggaran Pendapatan : Rp.95.200.000.000 Realisasi Pendapatan : Rp.86.495.345.255,07 Pagu Belanja : 95.200.000.000 Realisasi Belanja : Rp.93.451.574.543,50 Silpa : Rp.3.884.927.118,41</p>
7	RSUD ASEMBAGUS	<p>Pada hari Selasa, 20 Mei 2025 Pagu Anggaran : Rp. 32.012.064.436 Realisasi : Rp. 33.914.164.054 Silpa : Rp. 1.902.099.618</p>
8	RSUD BESUKI	<p>Pada hari Selasa, 20 Mei 2025 Pagu Anggaran : Rp. 28.155.081.660 Realisasi : Rp.29.109.934.608 Silpa : Rp.954.852.948</p>
9	DISNAKER	<p>Pada hari Selasa, 20 Mei 2025 Pagu Anggaran : Rp. 6..727.022.241 Realisasi : Rp. 4.851.471.975 Silpa : Rp.1.930.550 dikarenakan adanya refocusing dan beberapa kegiatan yang blm bisa dilaksanakan</p> <p>Catatan : - Ada beberapa Perusahaan yang msi belum sanggup untuk membayar gaji secara UMR</p>
10	DINAS PENDIDIDKAN DAN KEBUDAYAAN	<p>Pada hari Selasa, 20 Mei 2025 Pagu Anggaran : Rp. 626.955.718.362.00 Realisasi : Rp. 572.563.153.223. Silpa : Rp.54.392.565.139,00</p> <p>Catatan :</p>

No	Mitra Kerja	Hasil Rapat
		<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan supaya lebih perhatian terhadap aturan tentang pengangkatan guru honorer, jangan lagi ada pengangkatan guru honorer di sekolah tanpa melalui penjarangan pusat CPNS dan atau PPPK.
11	DISPORA DAN KONI	<p>Pada hari Selasa, 20 Mei 2025 Pagu Anggaran : Rp. 10.562.461.977 Realisasi : Rp. 8.893.104.712 Silpa : Rp. 1.669.357.265 Pagu urusan pemuda olahraga 2024 Rp. 1.934.040.000 Realisasi Rp. 1.709.941.800 Silpa Rp. 224.098.200</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran di Th. 2025 jangan sampai sama dengan Anggaran di Th.2025 terutama Perhatian terhadap Cabor harus benar benar diperhatikan. - Dinas pemuda dan olahraga dan koni harus melakukan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas mutu atlit - Untuk persiapan porpov koni membutuhkan dana yang cukup untuk melaksanakan pelatihan pra porpov. - Ketua KONI optimis dengan peluang juara atau mendali emas. - Seluruh atribut untuk atlet komisi IV merekomendasikan untuk menggunakan produk local yang ada di kabupaten situbondo seperti jaket, topi dan baju.

----- PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.) -----

Disampaikan terimakasih kepada Dr. H. Hambali, atas penyampaian rekomendasi Badan Anggaran DPRD Kabupaten Situbondo atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya penyerahan Laproan dan Rekomendasi Badan Anggaran DPRD Kabupaten Situbondo kepada Wakil Bupati Situbondo, disilahkan.

----- (PROSESI SERAH TERIMA dan FOTO BERSAMA) -----

Terima kasih,

Rapat Dewan Dan Hadirin Yang Kami Hormati,

Acara selanjutnya adalah penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi.

Untuk itu kami persilahkan kepada para Anggota DPRD untuk menyampaikan pendapat fraksinya.

disilahkan untuk mendaftarkan diri.

**>>> Interaksi Pimpinan Rapat Dengan Anggota Untuk Mengajukan
Fraksinya Mendaftar Urutan Pembacaan Pendapat Fraksi <<<**

Fraksi Pertama : Golkar

Fraksi Kedua : GIM

Fraksi Ketiga : PKB

Fraksi Keempat : PPP

Fraksi Kelima : DNS

Fraksi Keenam : PDIP

Baiklah kami langsung persilahkan kepada penyampai pendapat fraksi dari Fraksi Partai Golkar, dipersilahkan.

=====
PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI
=====

----- Anggota DPRD (HEROE SOEGIHARTONO, S.H.) -----



**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

**TERHADAP
RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
02 JUNI 2025**



**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Jl. Kenanga No. 01 Telp/ Fax. (0338) 675613 Situbondo 68312



**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD KABUPATEN SITUBONDO**

**TERHADAP
RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Situbondo

Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo

Saudara Anggota Forkopimda Kabupaten Situbondo

Saudara Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor,
Kepala Bagian dan Camat di lingkungan Kabupaten Situbondo

Saudara Direktur BUMD di Situbondo

Insan Pers dan hadirin sekalian yang berbahagia

Perkenankan untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan taufik dan hidayah-nya, sehingga kita semua dapat hadir dan mengikuti Rapat Paripurna tanpa ada halangan suatu apapun, semoga kehadiran kita semua menjadi bagian dari amal ibadah dan akan dilipat gandakan pahalanya.

Sholawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah berjasa besar dalam kemajuan agama, bangsa

dan kedamaian dunia semoga kita semua yang mentauladi akan mendapatkan syafaatnya di *Yaumul Qiyamah*.

Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami Hormati,

Kami atas nama Fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan Selamat Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 01 Juni. Peringatan Hari Lahir Pancasila jatuh pada hari minggu, dengan tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Menuju Indonesia Raya”. Semoga kedepannya kita semua dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap Tindakan, memperkuat fondasi negara menuju Indonesia Raya yang kuat, kokoh, dan manjadikan Situbondo Naik Kelas.

Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami Hormati,

Mari kita satukan hati dan pikiran untuk berkarya melakukan perjuangan dalam bergerak bersama dengan niatan yang sama untuk mencermati Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 320, bahwa Kepala Daerah harus menyampaikan Rancangan PERDA Tentang Pertanggung Jawaban APBD kepada DPRD, dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa BPK maksimal 6 (Enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Hal ini juga untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 23 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehubungan hal tersebut Fraksi Golkar memberikan Pendapat Akhir Fraksi atas Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Terlibat dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah bagi ASN adalah sebuah keniscayaan dan tak akan terhindarkan. Pilihannya hanya terlibat tetapi tidak memiliki pengetahuan atau terlibat dengan

pengetahuan. Jika kita punya ilmunya maka terlibat lebih aman karena kita bisa membentengi diri dari kesalahan dalam pengadaan. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, Fraksi Partai Golkar berharap Pemerintah Kabupaten Situbondo menyiapkan pejabat-pejabat pengadaan barang dan jasa yang mempunyai. Di perpres terbaru diatur pengadaan langsung (fisik) sampai dengan 400 juta (pasal 38) ketentuan ini disatu sisi untuk efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa karena pengadaan langsung prinsipnya bukan karena kepentingan lain tetapi terpenuhinya kebutuhan sesuai dengan *Value For Money*. Tetapi disini lain ketentuan terbaru ini bisa menjadi persoalan serius jika Pejabat pengadaan barang dan jasa tidak memahami isi pasal 9 ayat 1 huruf F2 tentang tata laksana dan standart dokumen pemilihan. Begitu juga dengan ketentuan pasal 91 di peralihan yang mengamanatkan LKPP membuat aturan terkait pemilihan penyedia atau metode pemilihan penyedia, sampai saat ini belum terbit.

2. Terkait pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024, diharapkan Kepada Pemerintah Daerah untuk terus mengevaluasi kualitas serapan APBD. Tujuannya sebagai bentuk antisipasi terhadap ragam persoalan yang terindikasi menjadi factor penghambat penyerapan APBD secara kompleks. Karena bisa berdampak yang sangat beragam, mulai dari pelayanan public yang tidak maksimal, pembangunan mandek, pergerakan ekonomi rakyat melemah dan dampak negatif lainnya.
3. Diharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Bersama DPRD dapat saling bersinergi dalam memajukan Kabupaten Situbondo dengan cara saling meningkatkan kemitraan yang sejajar antara

Pemerintah Daerah dan DPRD. Hal ini bisa dilakukan secara optimal dalam koridor saling asah dan saling isi dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi, tugas dan peran kita masing-masing dan juga sebagai upaya untuk menerapkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Fraksi Partai Golongan Karya pengelolaan keuangan Daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakan Akuntabilitas publik dalam semua tahapan. Oleh karena itu prinsip Akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada seluruh pengguna anggaran Pemerintah Daerah yang bekerja diatas legalitas dan legitimasi masyarakat.

4. Komitmen Pemkab Situbondo untuk mengupayakan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah sebagaimana di RKPD tahun 2024 dan upaya yang sudah digariskan untuk melakukan Intensifikasi maupun ekstensifikasi sebagaimana yang menjadi komitmen dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) daerah, tidak ditindak lanjuti dengan implementasi ditingkat OPD terkait. Dimana untuk penyusunan dan penetapan target pajak daerah tidak memiliki dasar perhitungan yang dapat diukur secara rasional. Kami ambil contoh Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan dengan target anggaran th. 2024 sebesar 17.872.227.040. terealisasi 10.167.322.671. atau 56,89. Itupun kalau dipilah hasil realisasi murni Pembayaran PBBP2 sebesar 7.394.391.345, pembayaran denda 586.531.359 dan piutang 2.236.399.967. hal ini berarti potensi uang pembayaran PBBP2 yg belum tertagih berkisar 7 – 10 M, Kondisi ini juga menunjukkan bahwa masih lemahnya pengawasan, monitoring dan pembinaan yang dilakukan oleh Bapenda, Camat maupun kepala Desa dalam

pembayaran PBBP2 ini, hal ini kami sampaikan karena masih banyak beberapa Kecamatan dan Desa yang tidak logis antara jumlah Wajib Pajak dan wajib pajak yang telah membayar PBB P2 nya, kami ambil contoh seperti Kecamatan Jatibanteng, Desa Sumberanyar jumlah WP 988 realisasi WP Cuma 2, Desa Wringin Anom jumlah WP 1.141 dan realisasi WP Cuma 6, maka dengan memperhatikan kondisi tersebut, Fraksi Partai Golongan Karya memberikan catatan sebagai berikut :

- a. Agar potensi pembayaran PBBP2 dimasukkan dalam target RPJMD 5 tahun kedepan yang belum tertagih berkisar antara 7–10M, sekaligus terhadap piutang PBBP2 sekarang pada posisi sekitar 50 M, apa masih ada peluang bisa ditagih, karena teorinya semakin besar piutang kemungkinan besar juga untuk tidak bisa ditagih. Oleh karena itu Bapenda, Camat dan Kepala Desa untuk segera mencari solusi.
- b. Meningkatkan peran Camat yang mencakup pengawasan, pelunasan, dan penyetoran PBBP2 oleh kepala Desa, serta bertanggung jawab atas keberhasilan pelunasan PBBP2 di wilayah kerjanya dengan membuat pakta integritas dan perubahan perbub tentang pelimpahan kewenangan kepada camat.
- c. Memberi anggaran kepada camat untuk melakukan monitoring, sosialisasi dan pembinaan kepada perangkat desa, termasuk ketua RT dan RW dalam mengoptimalkan pendapatan PBBP2. Sekaligus bisa dijadikan Reward dan Punishment

- d. Mengajak Kepala Desa agar bisa lebih menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya, mengingat para kades besar juga penerimaan ADD tahun 2024 sebesar sekitar 85 M, DD 154 M, terus BHP 10 M belum lagi ada desa yang memperoleh DID/BKK. Kondisi ini sangat jauh dengan perolehan PBBP2 sekabupaten yang hanya 7 sampai 10 M, Oleh karena itu peran kades dalam optimalisasi penerimaan PBBP2 sangat penting terutama dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap kewajiban pajak, dan memastikan pemungutan berjalan lancar, sekaligus Kades bisa menjadi motivator bagi Masyarakat untuk membayar PBBP2, dan manfaatnya, dan yang terpenting jangan main main dengan keuangan PBB. Koordinasikan dengan Bappenda lebih mantab.
- e. Terhadap desa-desa yang perolehan PBBP2 nya tidak rasional, disarankan kepada Mas Bupati melalui Bappenda agar dilakukan pembinaan khusus, apa yang menjadi penyebab dan kendalanya serta dicarikan Solusi terbaik supaya Situbondo naik kelas.
- f. Sebagai pertimbangan dan saran kepada TAPD agar pengalaman tahun 2024 dilakukan perbaikan pada APBD tahun berikutnya terutama mengenai besaran anggaran yang diterima kelurahan, masih belum mematuhi amanat PP 17 tahu 2018 pasal 30 Ayat 8, bahwa untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

sebesar dana desa yang diterima oleh desa dikabupaten/kota. Untuk itu agar di cek Kembali dan disesuaikan dengan regulasi yang ada.

5. Pada tahun 2024 pengelolaan pendapatan dan retribusi daerah tidak sesuai ketentuan hal ini mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah cukup besar, Adapun hal hal yg menjadi sebab adanya temuan tersebut diantaranya untuk pajak daerah banyak hal sedangkan untuk retribusi yaitu bendahara penerimaan masing-masing perangkat daerah tidak melaksanakan ketentuan tarif sesuai perda no 7 tahun 2023. Bahkan ada alasan OPD karena tidak ada dana untuk mencetak karcis ini menjadi lucu. Sehubungan dengan hal tersebut Fraksi Partai Golongan Karya memberikan catatan sebagai berikut :

- a. Bappenda agar lebih cermat dalam merencanakan dan menetapkan pendapatan terutama yang mencakup target penerimaan pajak dan retribusi dengan melihat data historis dan trend pertumbuhan ekonomi serta strategi untuk mencapai target tersebut mulai dari mengidentifikasi potensi pajak dan retribusi yg belum tergarap secara optimal, dengan memperkuat system informasi dan teknologi digital, lakukan evaluasi tarif dan efektifitas pemungutan pajak dan retribusi dan jadikan pajak dan retribusi tahun 2024 sebagai starting point untuk RPJMD 5 tahun kedepan lebih baik optimis dan terukur.
- b. Kepada TAPD agar kondisi tahun 2024 dijadikan acuan pada perencanaan dan penyusunan RPJMD 2025 – 2029. Dimana tidak ada lagi keluhan OPD untuk memungut retribusi sesuai regulasi

terbaru tidak tersedia anggarannya untuk mencetak karcis. Atau coba dipertimbangkan untung ruginya manakala karcis dilakukan sentralisasi melalui Bappenda. Sekaligus dibentuk Tim khusus untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap produk perda dan perkara implementasinya kepada Masyarakat dan pemberian sanksi manakala terdapat petugas yang tidak patuh dan taat pada regulasi tersebut.

6. Kerangka pembahasan belanja tentu tidak lepas dari arah kebijakan belanja daerah , baik dalam RKPD maupun KUA tahun 2024, Dimana dari dua dokumen tersebut terdapat 10 arah kebijakan dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah , efisien dan efektif. Sehubungan dengan hal tersebut Fraksi Partai Golkar memberikan catatan dan pertanyaan sebagai berikut:

- a. Penganggaran dan Realisasi belanja barang dan jasa pada tiga perangkat daerah dan belanja modal pada 20 perangkat daerah masih tidak tepat, karena itu TAPD perlu melakukan kajian kenapa tidak tepat, apakah tidak dilakukan verifikasi dengan semestinya, dengan tidak memperhatikan kesesuaian jenis belanja dan peraturan pengelolaan keuangan daerah. apakah terjadi gagal Lelang, gagal salur, pada mata anggaran yang bersumber dari mana yang gagal Lelang dan gagal salur. Disini kami mlihat sumber dana dari DBHCHT 33 M tidak terserap, agar dijelaskan alasannya tidak terserap tersebut padahal untuk DBHCHT sudah ada PMK nya yang mengatur, sudah dilakukan asistensi dan lain-lain, disayangkan dana 33 M tidak terserap ini

agar dijadikan Pelajaran jangan sampai terjadi lagi pada tahun berikutnya.

- b. Masih ditemukan pembayaran tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan keluarga dan tunjangan beras pada beberapa perangkat daerah tidak sesuai ketentuan artinya yang seharusnya sudah dihentikan pembayaran tunjangannya maupun ASN yang melakukan cuti besar dan menjalani tugas belajar, yang menjalani sanksi disiplin masih tetap dibayar. Hal ini disebabkan lemahnya pengendalian dan pengawasan di pimpinan OPD, selanjutnya agar kejadian seperti ini tidak akan terulang Kembali pada pemerintahan Mas Rio, dengan melakukan pengendalian atau buku jaga setiap ASN dan yang setiap tahun melaporkan model DK.
- c. Pada arah kebijakan belanja daerah khususnya untuk belanja pegawai, anggaran 2024 sebesar 766.426.056.110. dan realisasinya sebesar 687.132.798.462 terdapat sisa lebih 79.293.257.648, ini menunjukkan bahwa anggaran belanja pegawai overbudgeting dan semakin kelihatan karena tidak ada P-APBD tahun 2024, bahwa anggaran belanja pegawai di APBD induk sengaja di gelembungkan dan manakala nanti terjadi penyesuaian anggaran bisa digeser diambilkan dari gaji tersebut, dan hal ini sudah tidak patuh pada mandatory spending untuk belanja pegawai sebagaimana Undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah (HKPD) maksimal 30 persen. agar ini menjadi catatan TAPD untuk melakukan perubahan strategi dalam Menyusun perencanaan baik dlm RPJMD, RKPD, KUA

sudah barang tentu nantinya perlu dilakukan kajian kusus pajak hotel dan restoran utama raya supaya lebih meningkat perolehannya dari tahun sekarang sebab kalau kita tidak mengusulkan exit tol didekat utama raya mungkin akan berdampak pada penurunan Pendapatan karena orang yang menginap di hotel berkurang atau pengunjung sepi dan restoran menjadi mati sehingga Pemda akan merugi karena ada potensi pajak hotel dan restoran yang berkurang, mengingat utama raya punya daya magnet untuk disinggahi.

Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Dari berbagai kajian dan pertimbangan serta pembahasan yang dilalui dengan mengucap *Bismillahirrohmanirrohim* Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Situbondo **menyetujui dan menyepakati Terhadap Raperda Tentang Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2024.** menjadi Peraturan Daerah yang definitif.

Demikianlah Pendapat Fraksi Partai Golongan Karya Terhadap Raperda tersebut diatas, kami atas nama Fraksi Partai Golongan Karya memohon maaf apabila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhoi setiap langkah kita. **Aamiin.**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Situbondo, 02 Juni 2025

Mengetahui,
KETUA FRAKSI
PARTAI GOLONGAN KARYA



H. RACMAD. SH. M.Hum



SEKRETARIS FRAKSI
PARTAI GOLONGAN KARYA



HEROE SOEGIHARTONO. SH

JURU BICARA
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

----- PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.) -----

Terimakasih kepada saudara Heroe Soegihartono juru bicara dari Fraksi Golongan Karya dari Daerah Pemilihan Situbondo III, yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya yang mana pada prinsipnya menyetujui agar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dapat menjadi peraturan yang definitif.

Selanjutnya kami persilahkan kepada juru bicara dari Fraksi GIM.

----- Anggota DPRD (ANDRIAN OKTADIANSYAH, S.E.) -----



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI GIM
KABUPATEN SITUBONDO
Sekretariat : Jalan Kenanga No 1 68311
SITUBONDO – JAWA TIMUR



PENDAPAT AKHIR
FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU (GIM)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
DALAM
PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN
SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2024

*Bismillahirrahmanirrahim,
Salam Indonesia Maju Untuk Kita Semua*

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo.

Yth. Pimpinan rapat paripurna DPRD Kabupaten Situbondo

Yth. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

Yth. Sekretaris daerah, para asisten, para staf ahli, kepala dinas, kepala badan serta seluruh pejabat dilingkungan pemerintahan kabupaten situbondo

Yth. Segenap anggota FORKOPIMDA atau yang mewakili dan Rekan-rekan wartawan dan hadirin yang kami hormati

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati

Alhamdulillah robbil 'alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo pada hari ini dalam keadaan sehat wal 'afiat.

Sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pemimpin yang telah memberikan pencerahan bagi segenap umat manusia.

Rapat Sidang Paripurna Yang Berbahagia

Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih, kepada Pimpinan Rapat, yang telah memberi kesempatan kepada kami, Fraksi Gerakan Indonesia Maju untuk menyampaikan Pendapat Akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dalam forum yang terhormat ini. Fraksi GIM juga mengkritik tapi membangun yang tidak didasari oleh kebencian namun bentuk kepedulian kami terhadap pembangunan di situbondo pada era mendatang dan juga sebagai bentuk dari etos kerja kami sebagai bagian dari sinergi pemerintahan daerah. Maka, catatan – catatan yang menjadi temuan kami adalah :

1. Optimalisasi pemungutan pajak daerah dengan memanfaatkan data potensi pajak yang dimiliki, khususnya terhadap wajib pajak daerah yang hingga saat ini belum dilakukan pemungutan pajak daerah.
2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah, seperti : e-bphtb, e-PAD, NPWPD; serta merencanakan dan melaksanakan pemasangan alat perekam transaksi elektronik (APTb) khususny pajak hotel, pajak restaurant, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak sebagainya.
3. Menekankan kepada Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan pajak daerah, serta melakukan verifikasi terhadap laporan pajak daerah dari wajib pajak self assessment.
4. Di dalam penyusunan target penerimaan pajak daerah, Fraksi GIM berharap agar BPKAD dan BAPENDA harus dapat bekerjasama merancang target penerimaan pajak daerah berdasarkan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah tersebut.
5. Kepada badan pendapatan daerah, agar memanfaatkan tax monitor, mengawasi dan mengevaluasi serta menentukan alternatif pengendalian atas kelemahan dalam penggunaan tax monitor.

6. Untuk kedepannya Fraksi GIM mengharapkan agar memeriksa surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dan mengevaluasi kepatuhan wajib pajak daerah secara berkala.

7. Kenaikan pajak tanah atau NJOP yang diharapkan menaikkan PAD gagal total, ini perlu di kaji ulang mengingat banyak keluhan dari masyarakat terlalu tingginya pajak tidak sesuai kelayakan atas kelas tanah, sehingga masyarakat tidak mampu membayar pajak dan juga banyak transaksi di bawah tangan dengan cukup mengetahui kepala desa saja. untuk itu kami Fraksi GIM meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo untuk meninjau kembali Perbub No 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Sidang Paripurna Yang Terhormat,

Dengan mengucapkan **BISMILLAHIRROHMANIRROHIM** maka Fraksi Gerakan Indonesia Maju DPRD Kabupaten Situbondo menyetujui dan menyepakati bahwa **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2024** menjadi Peraturan Daerah yang definitif.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi kami, kami berharap untuk tahun ini agar hal – hal yang bersifat urgent seperti diatas juga mendapatkan perhatian dan keseriusan pemerintah daerah. Terima kasih dan Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhoi setiap langkah kita.

AMIN....AMIN...YAA...ROBBAL ALAMIN.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Situbondo, 2 Juni 2025

**FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU
DPRD KABUPATEN SITUBONDO**

Ketua



ANDRIAN OKTADIANSYAH, S.E.


HARI BUDI PRASETYA

ANDRIAN OKTADIANSAH

Selanjutnya kami persilahkan kepada juru bicara dari Fraksi PKB, disilahkan.

----- Anggota DPRD (ZULFIKAR PURNAMA RAHMAN, S.T.) -----



**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBODO**

Jl. Kemanga No. 1 Telp./FAX. (0338)675613 Situbondo (68312)



FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Mendaki Yang Tinggi

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
DALAM RANGKA
PERSETUJUAN DAN PENETAPAN
RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN 2024**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Yang terhormat Pimpinan Sidang dan Segenap Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo

Yang terhormat saudara Bupati dan Wakil Bupati Situbondo

Yang Saya hormati Seluruh anggota DPRD Kabupaten Situbondo

Yang saya hormati segenap Anggota FORKOPIMDA atau yang mewakili

Yang saya hormati Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Para Asisten, Para staf ahli, Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Para Camat dan Pimpinan BUMD serta Seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo

Yang saya hormati Rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia

Segala Puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam rapat paripurna Penyampaian pendapat akhir fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Situbondo **terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024** Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar dan tetap tegar maju tak gentar dalam perjuangan membela yang benar. Amin.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad, Nabi akhir zaman yang menjadi panutan umat manusia dan pembawa berkah bagi seluruh alam. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafa'at dari beliau di yaumul akhir nanti.

Saudara Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Hadirin dan Hadirat yang berbahagia.

Sebelum membacakan pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kami mengucapkan selamat hari lahir Pancasila dan selamat hari raya Idul Adha 1446 Hijriah.

Pada agenda rapat paripurna pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024 ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, diantaranya :

1. Pendapatan daerah Tahun 2024 sebesar Rp 1.860.040.951.500,00 (1 Triliyun 860 Milyar 040,951 Ribu 500 Rupiah) terealisasi sebesar Rp1.838.398.740.788,09 (1 Triliyun 838 Milyar 398 Ribu 740 Ribu 788 Rupiah) atau 98,84%, Capaian realisasi ini sudah baik secara global. Akan tetapi perlu kita pahami bahwa Pendapatan Daerah terdiri dari pendapat Asli Daerah (PAD) berkontribusi 14,7% dari total penerimaan daerah, sementara pendapatan transfer berkontribusi 85,3%. Proporsi demikian tentu mengindikasikan bahwa kemandirian fiskal dalam APBD Situbondo 2024 masih dalam kategori rendah, sehingga Pendapatan Daerah masih sangat ketergantungan dengan pemerintah pusat. Mencermati proporsi tersebut maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan penyediaan dan peningkatan pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat, dan Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi sebagai upaya penjaminan ketersediaan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan dana bantuan keuangan dari provinsi untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah.
2. Untuk meningkatkan kemandirian daerah, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terus mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan kenaikan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah dan melakukan evaluasi terus menerus terhadap tingkat efektifitas dan implementasi kebijakan pendapatan asli daerah dengan langkah :
 - a. Melakukan penyusunan target pajak daerah berdasarkan pada perhitungan yang jelas dengan membuat kertas kerja yang memuat metode analisis dalam penyusunan target.
 - b. Optimalisasi pemungutan pajak daerah dengan memanfaatkan data potensi pajak yang dimiliki, khususnya terhadap wajib pajak daerah yang hingga saat ini belum dilakukan pemungutan pajak daerah. Data dari LHP BPK menyampaikan bahwa masih terdapat pemilik usaha perhotelan dan restoran/rumah makan yang memanfaatkan air tanah yang belum ditetapkan sebagai wajib pajak.

- c. Memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah, seperti: e-BPHTB; e-PAD; NPWPD; serta merencanakan dan melaksanakan pemasangan Alat Perekam Transaksi Elektronik khususnya pajak hotel, pajak restaurant, pajak hiburan, retribusi parkir, dan sebagainya;
- d. Sedangkan untuk pendapatan pajak PBB-P2, tingkat capaian realisasi pajak PBB-P2 pada angka 56,89 %. Hanya ada 7 desa dengan capaian 100%, 45 desa capaian di atas 50%, sebanyak 91 desa capaiannya dibawah 50% dari 136 desa dan kelurahan. Minimnya realisasi pendapatan dari sektor ini karena naiknya NJOP per meter persegi, sulitnya cara pembayaran yang harus dilakukan oleh wajib pajak dan banyaknya pajak tahun sebelumnya akan berdampak bertambahnya piutang dari sektor ini sehingga diperlukan terobosan untuk mengoptimalkan pendapatan . Untuk optimalisasi pendapatan pajak PBB-P2 tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan :
 1. Petugas pemungut pajak di siapkan fasilitas alat pembayaran sejenis mesin EDC (Elektronik Data Capture)
 2. Memberikan insentif untuk petugas yang capaian kinerjanya baik, serta sanksi bagi petugas yang capaian kinerjanya tidak baik.
 3. Pemerintah daerah melakukan pemutihan atau memberikan potongan (discount) pembayaran atas tunggakan pajak beberapa tahun sebelumnya sehingga mendorong wajib pajak untuk melunasi target pembayaran pada tahun berjalan
 4. Untuk memaksimalkan potensi pendapatan, Pemerintah Daerah perlu menambah karyawan atau tenaga administrasi demi tercapainya PAD yang maksimal.
- e. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 menyajikan realisasi pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp 157.356.079.912,93 (157 Milyar 356 Juta 079 Ribu 912 Rupiah) atau sebesar 971,68% dari anggaran sebesar Rp. 16.194.166.233,00 (16 Milyar 194 Juta 166 Ribu 233 Rupiah). Pendapatan Retribusi Daerah tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp. 143.136.500.836,43 (143 Milyar 136 Juta 500 Ribu 836 Rupiah) atau sebesar 1.006,62% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp 14.219.579.076,50 (14 Milyar 219 Juta 579 Ribu 076 Rupiah). Kenaikan tertinggi terdapat pada retribusi jasa umum khususnya retribusi pelayanan kesehatan yaitu sebesar Rp. 139.736.012.964,00 (139 Milyar 736 Juta 012 Ribu 964 Rupiah). Kenaikan tersebut disebabkan adanya perubahan

nomenklatur pendapatan atas pelayanan pada BLUD yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan layanan BLUD pada lain-lain PAD yang sah, namun pada Tahun 2024 diakui sebagai pendapatan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam penyusunan target pendapatan asli daerah (PAD) ke depan, BPKAD dan BAPENDA hendaknya secara serius mengikuti arahan BPK sebagaimana dalam LHP BPK atas LKPD Situbondo tahun 2024, khususnya bagaimana perangkaan target penerimaan didasarkan pada analisis potensi. Untuk hal tersebut Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan :

1. Penyusunan dan Penetapan Target Pendapatan Retribusi Daerah dapat dilakukan dengan memperhitungkan berbagai aspek, termasuk potensi objek retribusi, kebijakan tarif, tren historis penerimaan, serta faktor ekonomi dan regulasi yang berlaku. Namun, faktanya proyeksi pendapatan tahun 2024 yang disampaikan perangkat daerah kepada Bapenda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai target pendapatan retribusi daerah dengan yang ditetapkan dalam DPA-SKPD.
2. Ada ketentuan tarif baru sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan seharusnya perubahan tarif disesuaikan dengan ketentuan tersebut sejak perda ditetapkan, namun hal ini tidak dilakukan oleh perangkat daerah pemungut pajak dan retribusi. OPD pemungut pajak dan retribusi masih memakai tarif berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2011, maupun peraturan lain yang sudah tidak berlaku, hal ini menurut BPK berakibat pemerintah kabupaten Situbondo Kehilangan potensi pendapatan retribusi daerah yang kurang/tidak dipungut sebesar Rp 4.036.020.525,00 (4 Milyar 36 Juta 20 Ribu 525 Rupiah). Kehilangan Potensi pendapatan ini berasal dari :
 - a. Kehilangan potensi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Wisda Rengganis Pasir Putih, Hotel Sidomuncul I, Hotel Sidomuncul II, dan Hotel Papin Inn dengan jumlah total sebesar Rp 132.975.000,00 (132 Juta 975 ribu Rupiah)
 - b. Kehilangan Potensi pendapatan retribusi kebersihan pasar sebesar Rp 32.692.700,00 (32 Juta 692 Ribu 700 Rupiah)
 - c. Kehilangan Potensi pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup, sebesar Rp. 320.260.000,- (320 Juta 260 Ribu Rupiah)

- d. Kehilangan Potensi pendapatan retribusi persampahan/kebersihan untuk pedagang kios dan los pasar sebesar Rp. 26.348.600,00.(26 Juta 348 Ribu 600 Rupiah)
 - e. Kehilangan Potensi pendapatan retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp. 3.267.229.225,-(3 Milyar 267 Juta 229 Ribu 225 Rupiah)
 - f. Kehilangan Potensi kehilangan pendapatan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum selama 5 bulan sebesar Rp. 256.805.000,00.(256 Juta 805 Ribu Rupiah)
3. Evaluasi umum atas Belanja daerah tahun 2024 sebagaimana dilaporkan dalam LKPD tahun 2024 terutama terkait dengan pelaksanaan *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah Situbondo pada tahun 2024, meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat Undang undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Kabupaten Situbondo pada Tahun 2024 alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp. 605.911.373.608,00 atau memiliki proporsi sebesar 29,13%;
 - b. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji sesuai amanat Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kabupaten Situbondo pada Tahun 2024 alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp. 364.012.315.348,00 (364 Milyar 12 Juta 315 Ribu 348 Rupiah) atau memiliki proporsi sebesar 23,53%;
 - c. Besaran anggaran belanja mandatory spending infrastruktur pelayanan publik yang seharusnya minimal 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah dan atau desa sesuai amanat Undang Undang No 1 tahun 2022. Kabupaten Situbondo pada Tahun 2024 alokasi anggaran infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp. 399.583.683.573,00 (399 Milyar 583 Juta 683 Ribu 573 Rupiah) atau memiliki proporsi sebesar 60,27 %;
 - d. Pada tahun anggaran 2024 terjadi ketidakmatangan perencanaan Belanja Daerah di hampir semua pos belanja daerah. Salah satu yang paling menonjol adalah ketidakmatangan perencanaan Belanja pegawai Tahun 2024. Dari anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 788.426.056.110,00(788 Milyar 426 Juta 56 Ribu 110 Rupiah), hanya terealisasi 687.132.798.462,00 (687 Milyar

132 Juta 798 Ribu 462 Rupiah) atau 89,65%. Rendahnya realisasi ini berdampak silpa yang cukup besar dan kurang efektif. Untuk hal tersebut Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyarankan agar supaya dalam penganggaran Belanja Pegawai harus memperhitungkan potensi kebutuhan secara rasional atau setidaknya berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang No. 1 tahun 2022, Permendagri No. 15 tahun 2023 tentang pedoman Penyusunan APBD tahun 2024, dan tentu berdasarkan besaran realisasi belanja pegawai tahun 2023 sebesar Rp. 651.626.798.729,00 (651 Milyar 626 Juta 798 Ribu 729 Rupiah) .

Hadirin sidang paripurna yang berbahagia,

Setelah menyampaikan beberapa telaah dan rekomendasi sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka Kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dengan ucapan **Bismillahirrahmanirrahim, MENERIMA DAN MENYETUJUI Terhadap RAPERDA Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024** untuk di tetapkan dan di sahkan menjadi Perda Definitif.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa , semoga Kabupaten Situbondo kedepan bisa lebih baik, semakin maju dan naik kelas.

**Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamit Thariiq
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb**

Situbondo, 02 Juni 2025
**PIMPINAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD. KABUPATEN SITUBONDO**

Ketua,  H. MOKHAMMAD BADRI, ST		Sekretaris,  JOHANTONO, S.Pd
--	---	---

Dibacakan Oleh,

ZULFIKAR P.R.

----- PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.) -----

Terimakasih kepada saudara Zulfikar Purnama Rahman Mas Oki Anggota Fraksi PKB dari Daerah Pemilihan Situbondo I, yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya yang mana pada prinsipnya menyetujui agar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dapat menjadi peraturan yang definitif.

Selanjutnya kami persilahkan kepada juru bicara dari Fraksi PPP, disilahkan.

----- Anggota DPRD (NURIL HASHINA, S.H.) -----



**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Kantor : Jl. Kenanga No. 1 Situbondo Telp. 0338-675613



**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SITUBONDO
DALAM PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN
SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2024**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yth. Sdr. Pimpinan Rapat dan Pimpinan DPRD kab. Situbondo;
Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Situbondo;
Yth. Sdr. Anggota Forkopimda Kabupaten Situbondo;
Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Situbondo;
Yth. Sdr. Pimpinan Instansi Fertikal di Kab. Situbondo;
Yth. Sdr. Sekda kab. Situbondo, Sek. DPRD kab. Situbondo, para
Asisten, Staf Ahli, kepala Dinas, kepala Badan, kepala Kantor,
kepala Bagian dan Camat se- kab. Situbondo;
Yth. Sdr. Pimpinan BUMN di Kab. Situbondo;

Yth. Sdr. Direksi BUMD Kab. Situbondo, Direktur RSUD dr. Abdurrahem,
Direktur RSUD Besuki dan Direktur RSUD Asembagus;

Yth. Rekan-rekan Anggota DPRD Kab. Situbondo;

Yth. Rekan-rekan Pers dan Undangan sekalian yang berbahagia.

Tiada yang lebih indah untuk kita ucapkan mengawali penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan pada rapat paripurna ini, terkecuali ucapan syukur ALHAMDULILLAH kita kehadirat Maulana Azza-wajalla. Ucapan syukur tersebut harus sejalan dan seirama dengan pengakuan hati dan diiringi dengan perbuatan yang nyata yaitu melaksanakan perintahNya dan menjahui laranganNya. Kita tentu menyadari sepenuhnya, karena semata-mata ridla dan bimbinganNya sehingga pada hari ini, Senin tanggal 02 Juni 2025 kita dapat bersama-sama mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dalam rangka pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2024.

Tidak lupa pula, semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan ke haribaan Baginda Rasul Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran terakhir yang di turunkan oleh Allah SWT ke muka bumi yang berlaku di alam semesta ini sepanjang masa, serta menjadi referensi utama bagi manusia agar berahlakul karimah dan mengangkat derajat martabat manusia itu sendiri dari tempat yang rendah dan hina ke tempat yang mulia dan terhormat.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,.....

Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini kami, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan penghargaan dan terima kasih pada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2024, utamanya kepada Yth. saudara Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris daerah, OPD beserta staf dan seluruh jajaran Pemerintah daerah lainnya. Demikian pula ucapkan terima kasih kami kepada rekan Fraksi-fraksi, Badan Anggaran serta Komisi-komisi DPRD yang telah secara maksimal mempelajari dan membahasnya bersama-sama dengan tim anggaran Pemerintah daerah beserta jajarannya, sehingga dalam waktu relatif singkat dapat terselesaikan.

Hadirin sekalian yang berbahagia

Pada kesempatan di forum yang berbahagia ini Fraksi kami, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Situbondo menyampaikan beberapa hal yang antara lain :

1. Kita tau semua Bahwa APBD tahun 2024 dilaksanakan tanpa melakukan Perubahan APBD pada tahun berjalan, dimana pada kebiasaannya setiap tahun selalu dilakukan perubahan anggaran sehingga ada kesempatan bagi OPD pengampu kegiatan bisa melakukan perubahan dan perbaikan kegiatan di PAPBD tahun berjalan, sehingga perencanaan kegiatan bisa dilakukan sinkronisa

dengan kegiatan yang seharusnya dilakukan. Untuk itu kedepan kami berharap semua perencanaan kegiatan yang akan dituangkan dalam APBD harus betul-betul sesuai dengan prediksi kegiatan satu tahun sehingga apabila terjadi kondisi seperti tahun kemarin tidak dilakukan perubahan APBD maka kita tetap mengacu kepada perencanaan sebagaimana yang tertuang di APBD induk.

2. Perencanaan kegiatan di masing-masing OPD harus betul-betul dilakukan dengan cermat oleh konsultan perencana sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan lapangan, sehingga pemanfaatan anggaran itu betul –betul sesuai dengan kebutuhan, sehingga antara rencana anggaran dengan realisasi anggaran selisihnya tidak terlu timpang yang bisa mengakibatkan serapan anggaran kecil sebagaimana yang kita lihat di beberapa OPD seperti inspektorat dan BKPSDM dan OPD-OPD yang lain.
3. Sebagaimana yang terjadi pada APBD 2024, bahwa kewenangan Bupati yang berlebihan mengintervensi perencanaan yang sudah ditetapkan melalui APBD, dengan memunculkan Perbup baru mendahului PAPBD yang sifatnya tidak mendesak agar tetap memperhatikan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai contoh kegiatan pembangunan GOR dalam APBD 2024 dianggarkan 22Miliar tetapi dengan kewenangan yang berlebih anggaran bisa dinaikkan menjadi 30,8Miliar, hal ini untuk menjaga konsistensi penganggaran dalam APBD.
4. APBD 2024 memberi target Optimis terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Situbondo sebesar 300 Miliar,

kenyataannya realisasi dari target itu jauh dari harapan yang diinginkan yaitu terealisasi sebesar 271Miliar, selisihnya sangat besar yaitu 64Miliar, untuk itu kedepan pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan daerah perlu melakukan terobosan-terobosan dengan meningkatkan kesadaran para pemilik usaha agar sadar bayar pajak, memberi reward kepada pemilik usaha yang taat bayar pajak termasuk melakukan upaya penggalian potensi lain yang belum disimaksimalkan.

5. Bagian dari upaya peningkatan PAD dari sektor pajak PBB pada tahun 2024 ini kinerjanya sangat lemah, hal ini perlu ada evaluasi terhadap Peraturan Bupati yang menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dirasa sangat memberatkan kepada masyarakat. Dan bagian dari upaya untuk meningkatkan optimalisasi Pajak PBB perlu ada pendelegasian kewenangan dari bupati kepada Camat yang kewilayahannya lebih dekat kepada desa.
6. Termasuk dari upaya peningkatan PAD dari sektor pajak juga perlu ada system pengelolaan retribusi parkir yang bisa terkontrol dengan baik dan termasuk pula harus ada penyesuaian karcis retribusi dengan perda yang baru, kita tau dilapangan Karcis itu masih menggunakan perda yang lama.
7. Perlu adanya Penataan data ASN dan PPPK yang dilakukan oleh BKPSDM secara riil untuk mengetahui besaran jumlah gaji pegawai, hal ini untuk mengetahui berapa jumlah akres 2,5% yang seharusnya dilakukan dalam penganggaran gaji tersebut, sebab hampir setiap tahun kelebihan gaji ini sangat besar berkisar diangka 7-10%.

Rapat Paripurna DPRD yang berbahagia

Dari berbagai kajian dan pendapat diatas, Fraksi kami, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Situbondo dengan memohon Petunjuk dan Ridla ALLAH SWT. Dengan mensyaratkan agar kajian dan pendapat kami diatas betul-betul diperhatikan dan dilaksanakan, teriring ucapan :

Bismillahirrahmanirrahim

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN SITUBONDO
MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2024
UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PERATURAN DAERAH DIFINITIF.**

Demikianlah Pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD kabupaten Situbondo dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2024 . Semoga ada guna dan manfa'atnya.

Ter-iring doa , ucapan terima kasih serta permohonan ma'af yang sebesar-besarnya.

Alham-dulillahi-rabbil alamin

Wallahul-muwaffiq ilaa aqwamit-tharieq

Wassalamu'alaikum Ws.Wb.

Situbondo, 02 Juni 2025

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (FPPP)
DPRD KABUPATEN SITUBONDO**

Ketua

ARIFIN, S.H.MH



Sekretaris

H.M. HASAN ILLIYIN, SPsi

----- PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.) -----

Terimakasih kepada saudari Nuril Hashina juru bicara dari Fraksi PPP dari Daerah Pemilihan Situbondo IV, yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya yang mana pada pronsipnya menyetujui agar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dapat menjadi peraturan yang definitif.

Selanjutnya kami persilahkan kepada juru bicara dari Fraksi DNS.



**PANDANGAN AKHIR
FRAKSI DNS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2024**

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu, Namu Buddhaya, Salam kebajikan.

Yang kami hormati,
Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Situbondo,
Bupati dan Wakil Bupati Situbondo beserta seluruh jajaran,
Sekretaris Daerah dan Jajaran Forkopimda
Kepala dinas dan Kepala Badan serta jajaran eksekutif.
Serta seluruh hadirin yang kami banggakan.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat mengikuti rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Persetujuan **RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024.**

Sebelum kami menyampaikan pandangan akhir Fraksi, perkenankanlah kami mengucapkan:
Selamat Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2025.

Momentum ini bukan sekadar peringatan seremonial, tetapi refleksi mendalam atas nilai-nilai dasar berbangsa. Khususnya, Sila Kelima — Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia — menjadi pengingat bagi kita semua agar penyelenggaraan pemerintahan benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

Di tengah berbagai capaian pembangunan, kami masih mencatat adanya anak-anak di pelosok Situbondo yang belum terjangkau pendidikan formal secara layak, serta para lansia yang belum memperoleh akses pendidikan dasar maupun keterampilan dasar. Ini menjadi catatan serius bagi kita semua, bahwa keadilan sosial belum sepenuhnya hadir dalam aspek pendidikan.

Fraksi DNS berharap, nilai-nilai Pancasila senantiasa menjadi kompas dalam pengambilan keputusan, agar pembangunan daerah semakin berpihak kepada kelompok yang selama ini belum terjangkau secara merata.

Hadirin sidang Paripurna yang kami hormati.

Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera (DNS) menyampaikan apresiasi atas kerja keras Pemerintah Daerah bersama Panitia Khusus (Pansus) dan seluruh perangkat yang terlibat dalam proses pembahasan Raperda ini.

Fraksi DNS memandang bahwa proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian penting dari siklus tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Dokumen pertanggungjawaban ini bukan sekadar laporan administratif, namun cerminan dari bagaimana kebijakan anggaran dijalankan dalam realitas di lapangan.

Hadirin sidang Paripurna yang kami hormati.

Setelah mencermati dokumen yang disampaikan oleh pemerintah daerah, serta mengikuti dinamika pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD, Fraksi DNS menyampaikan beberapa pokok pandangan sebagai berikut:

1. Pengelolaan APBD Perlu Terus Diperkuat

Kami menilai bahwa pelaksanaan APBD 2024 telah menunjukkan sejumlah kemajuan, terutama dari sisi efisiensi belanja dan peningkatan PAD. Namun

demikian, masih terdapat ruang perbaikan dalam hal optimalisasi program prioritas dan sinergi antar perangkat daerah.

2. Catatan Kritis terhadap Kualitas Serapan Anggaran

Fraksi DNS mendorong agar tidak hanya fokus pada besaran serapan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa serapan tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan publik, pengurangan ketimpangan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Perlunya Evaluasi Berbasis Hasil (Outcome-Based)

Evaluasi terhadap program dan kegiatan ke depan diharapkan tidak hanya berhenti pada capaian output, namun juga menyentuh dimensi manfaat langsung bagi masyarakat.

4. Keterlibatan Publik dan Transparansi

Kami mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan APBD. Pemerintah daerah diharapkan terus membuka akses informasi publik secara aktif, bukan hanya responsif.

Hadirin sidang Paripurna yang kami hormati.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang konstruktif, Fraksi DNS menyampaikan beberapa saran untuk menjadi perhatian bersama:

Pertama, kami mendorong agar pemanfaatan SIPD dapat dioptimalkan secara menyeluruh, baik untuk informasi pembangunan maupun keuangan daerah.

Kedua, seluruh OPD yang memiliki kewenangan dalam peningkatan PAD diharapkan segera memperbarui data potensi yang dimiliki, dan menyampaikannya kepada DPRD sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan fiskal ke depan.

Ketiga, penting kiranya bagi Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Pendapatan Daerah, agar mampu melakukan supervisi dan pemutakhiran data potensi PAD secara periodik dan terkoordinasi.

Keempat, Fraksi DNS juga mendorong TAPD untuk memperkuat SDM dalam proses verifikasi dan kajian RKA SKPD, khususnya dalam hal penyesuaian pendapatan dan belanja agar lebih realistis dan terukur.

Kelima, terkait catatan pembangunan GOR Situbondo, kami berharap pengawasan dan pengendalian dari dinas teknis dapat lebih diperkuat demi mencegah temuan serupa di masa mendatang.

Keenam, pengelolaan aset daerah perlu lebih inovatif, tidak hanya terbatas pada inventarisasi, tapi juga diarahkan agar aset tersebut dapat memberikan kontribusi nyata bagi PAD.

Dan terakhir, kami mendorong Inspektorat bersama seluruh perangkat daerah menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas LKPD 2024 secara tuntas, sebagai bentuk komitmen atas perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Demikian saran kami, semoga menjadi bagian dari upaya kolektif untuk membangun Situbondo yang lebih baik.

Kesimpulan

Dengan mempertimbangkan keseluruhan dinamika dan masukan, **Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,** dengan tetap memberikan sejumlah catatan dan harapan perbaikan ke depan.

Persetujuan ini kami berikan sebagai bentuk komitmen terhadap keberlangsungan pemerintahan daerah, dengan semangat menjaga keseimbangan antara fungsi

FRAKSI DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA DPRD SITUBONDO

Ketua Fraksi DNS


JANUR SASRA ANANDA SE

Sekretaris Fraksi DNS


H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI

JURU BICARA FRAKSI DNS

----- **PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)** -----

Terimakasih kepada saudara Toton Beni Martono juru bicara dari Fraksi Golongan Karya dari Daerah Pemilihan Situbondo VI, yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya yang mana pada prinsipnya

menyetujui agar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dapat menjadi peraturan yang definitif.

Kesempatan terakhir kami persilahkan kepada juru bicara dari Fraksi PDIP.

----- Anggota DPRD (NINGSIH MS, S.Pd.I.,M.Pd.) -----



PENDAPAT AKHIR
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
DALAM RANGKA
PERSETUJUAN DAN PENETAPAN
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
2024

Yth. Pimpinan Rapat dan Pimpinan DPRD kab. Situbondo

Yth Bupati dan Wakil Bupati Situbondo

Yth. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Situbondo :

- Kapolres Situbondo
- Komandan Kodim 0823
- Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo
- Kepala Pengadilan Negeri Situbondo

Yth. Sdr. Pimpinan Instansi Fertilal Kab. Situbondo

Yth. Sekda kab. Situbondo, Sekretaris. DPRD kab. Situbondo, para Asisten, Staf Ahli, kepala Dinas, kepala Badan, kepala Kantor, kepala Bagian dan Camat se- kab. Situbondo

Yth. Sdr. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kab. Situbondo

Yth. Rekan-rekan Anggota DPRD Kab. Situbondo

Yth. Rekan-rekan Pers dan Undangan sekalian yang berbahagia

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarkatuh

Selamat siang salam sejahtera.

Merdeka!!!

Salam Pancasila

Bismillahirrahmanirrohim...

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, segala Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas ridlaNYA pada saat ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dalam keadaan Sehat wal 'Afiat, Lahir dan Batin serta masih diberi kekuatan nikmat Iman dan islam Sehingga dapat memenuhi panggilan tugas dan tanggung jawab kita dalam rangka Persetujuan dan Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan atas keharibaan Sang Revolusioner Padang Pasir yakni, Nabi Besar Rosulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang kita rasakan pada Siang ini. semoga kita semua selalu mendapat syafaatnya hingga yaumul kiamah, Amiin Ya Rabbal Aalamiin.

Hadirin sekalian yang terhormat

Dalam kesempatan ini terlebih dahulu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang di berikan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, Semoga segala apa yang telah diperbuat untuk ini menjadi ibadah dan mendapatkan pahala serta Ridha Allah S.WT

Hadirin sekalian yang kami hormati

Sebelum kami sampaikan Pendapat Akhir kami tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, Kami ucapkan selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025. ***“Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indnesia Raya.”***

Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan pidato monumental yang menjadi tonggak lahirnya Pancasila. Dalam pidato itu, Bung Karno menegaskan bahwa dasar negara Indonesia merdeka tidak boleh diambil dari ideologi asing, melainkan harus digali dari kepribadian dan nilai-nilai luhur bangsa sendiri.

Bung Karno menyampaikan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga bintang penuntun (leitstar) bagi perjalanan bangsa Indonesia. Ia adalah cahaya yang menuntun Indonesia ke masa depan, pemersatu di tengah keberagaman, serta kompas moral dalam menghadapi tantangan zaman.

Dalam Sidang Umum PBB XV, Pada tanggal 30 September 1960 Bung Karno dalam Pidato “To Build The World A New.” Menyampaikan Bahwa Pancasila Bukan semata – mata kensepsi ideologi belaka, Melainkan sebuah Pedoman yang dialektis sekali untuk bertindak.

Ketika ditarik pada konteks Situbondo kami mengajak bahwa semangat Keindonesiaan yang di dengungkan Bung Karno pada Masa itu juga menjadi semangat Untuk Kabupaten situbondo untuk terus menjaga pancasila dan sekaligus menjadi penuntun untuk Mwujudkan situbondo naik kelas. Namun Hal ini tentu butuh dan sangat perlu aksi nyata dengan di mulai dari Pengelolaan APBD Yang sehat dan pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD yang Jelas.

Hadirin sekalian yang kami hormati

Rapat Paripurna hari ini bukanlah sekedar seremonial tahunan yang bisa kita lewati begitu saja tanpa makna. Ini adalah momentum untuk menguji, apakah kekuasaan sudah dijalankan dengan tanggung jawab, apakah anggaran publik telah dikelola dengan keadilan dan keberpihakan, dan yang paling penting apakah setiap rupiah dari uang rakyat telah kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang nyata.

Fraksi PDI Perjuangan menyambut laporan pertanggungjawaban ini bukan dengan pujian kosong, tapi dengan kesadaran penuh bahwa laporan ini menyimpan cerita tentang keberhasilan yang patut diapresiasi, tetapi juga tentang ketimpangan yang tak boleh disembunyikan. Karena di balik grafik dan tabel, ada suara rakyat yang kian resah, ada ketidakpuasan yang terus membesar.

Maka dari itu Kami Fraksi PDI Perjuangan hadir di forum ini tidak untuk membiarkan kekeliruan berlalu tanpa koreksi. Kami datang membawa komitmen ideologis bahwa setiap kebijakan harus berpihak kepada yang lemah, yang tertinggal, dan yang selama ini tak bersuara.

Hadirin sekalian yang kami hormati

Dalam kesempatan ini, Setelah melalui pembahasan dan kajian terhadap Persetujuan dan Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Situbondo akan menyampaikan beberapa hal antara lain sebagai berikut :

1. Adanya Jalan Tol yang melintas di Kabupaten Situbondo perlu menjadi perhatian Khusus Pemerintah Daerah dalam rangka Stabilisasi Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Situbondo. Seperti UMKM Naik Kelas dan lain sebagainya ini harus diperhatikan dan

dipertimbangkan bagaimana daya beli ini tinggi karena dengan adanya Tol ini mungkin akan sangat besar dampaknya terhadap perekonomian masyarakat situbondo jangan sampai Situbondo hanya dilewati. Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan agar diperjuangkan adanya Rest Area dan Exit Tol di sekitar Obyek Wisata misalnya Utama Raya dan sekitar taman Nasional Baluran. Karena harus kita akui bahwa keberadaan Obyek Utama Raya dan taman nasional Baluran menjadi daya tarik bagi wisatawan disamping tempat – tempat wisata lainnya.

2. Target pendapatan Daerah Kabuapten situbondo harus Realistis terutama Perolehan PAD jangan hanya main – main angka dan seolah menyeimbangkan antara Pendapatan dan Belanja atau hanya sekedar bisa menepuk dada seolah - olah kita mampu meningkatkan PAD. Realitanya dalam pelaksanaanya target tidak terpenuhi sehingga banyak program kegiatan pembangunan yang tidak dapat dilaksanakan dengan alasan Rekofusing. Pada akhirnya kepentingan rakyatlah yang dikorbankan.
3. Adanya Piutang Pajak Bumi dan bangunan sebesar 50 Milyard lebih sungguh sangat ironis. Pemerintah kabupaten perlu melakukan inovasi cerdas untuk meminimalisir penunggaan pajak. Para Camat perlu diberikan kewenangan khusus dalam mengkoordinir desa/kelurahan dalam memenuhi target perolehan pajak.
4. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten situbondo karena sangat dibutuhkan keberadaannya.
5. Dalam Era Globalisasi seperti saat ini Pendidikan Nilai – Nilai Pancasila Perlu di bumikan melalui pendidikan dasar, hal ini perlu untuk mengantisipasi adanya pengaruh – pengaruh budaya asing yang Liberal dan Radikal.

6. Kurangnya Guru di Satuan Pendidikan SD dan SMP Se – Kabupaten situbondo yang harus menjadi perhatian khusus Pemerintah kabupaten situbondo dalam rangka mengupayakan Pendidikan yang baik untuk Anak didik sebagai generasi bangsa di masa yang akan datang. Dari hasil temuan kami Fraksi PDI Perjuangan ada Kurang Lebih 900 Orang guru.

Hadirin sekalian yang terhormat

Dari berbagai kajian dan pendapat diatas, Fraksi kami, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Situbondo dengan memohon Petunjuk dari Tuhan yang maha Kuasa serta didasari semangat pengabdian kepada masyarakat, Maka:

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
MENYETUJUI
RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN 2024**

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah kabupaten Situbondo
yang Difinitif.

Ter-iring doa, ucapan terima kasih serta permohonan ma'af yang sebesar-besarnya. Semoga ada guna dan manfaatnya kepada kita semua khususnya untuk mempercepat pembangunan daerah Kabupaten Situbondo.

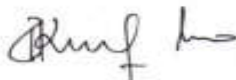
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Merdeka.....

Situbondo, 02 Juni 2025

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(FPDIP)
DPRD KABUPATEN SITUBONDO**

K e t u a Fraksi



RUDI AFianto, S.Pd M.Pd

Sekretaris Fraksi



ANDI HANDOKO, SM

Juru Bicara



NINGSIH MS, M.Pd

----- **PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)** -----

Terimakasih kepada saudari Ningsih MS, S.Pd.I juru bicara dari Fraksi PDIP dari Daerah Pemilihan Situbondo IV, yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya yang mana pada prinsipnya dapat menyetujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 menjadi Perda yang definitif

Rapat Dewan Dan Hadirin Yang Kami Hormati,

Setelah kita ikuti bersama Pendapat Akhir Fraksi dari keenam Fraksi DPRD, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar Fraksi-fraksi telah menyetujui dengan catatan/tidak menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah yang definitif.

Namun demikian untuk formalnya masih saya tawarkan kepada seluruh Anggota Dewan Yang Terhormat, apakah Saudara-saudara Anggota Dewan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang definitif.

=====

PERSETUJUAN DPRD

=====

----- **Anggota DPRD (semua)** -----

Setuju . . .

----- **PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)** -----

KETOK 1 KALI

Terima kasih atas persetujuannya.

Rapat Dewan Dan Hadirin Yang Kami Hormati,

Acara selanjutnya marilah kita ikuti bersama acara Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Pimpinan DPRD dengan Bupati Situbondo, untuk itu kami serahkan kepada saudara Protokol untuk memandunya., disilahkan....

=====

PENANDATANGANAN BERITA ACARA

=====

----- PROTOKOL -----

Hadirin undangan yang kami hormati.

Selanjutnya penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024.

Kepada yang terhormat Wakil Bupati Situbondo beserta Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo berkenan mengambil tempat.

Hadirin dimohon berdiri.

----- (PROSESI PENANDATANGANAN dan FOTO BERSAMA) -----

Penandatanganan dan foto bersama selesai.

Kami persilahkan kepada yang terhormat Wakil Bupati Situbondo beserta Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo untuk kembali ketempat.

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Bapak ibu yang kami hormati acara selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan rapat.

----- **PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)** -----

Terima kasih kepada Saudara Protokol yang telah memandu Penandatanganan Berita Acara.

Rapat Dewan dan Hadirin yang Kami hormati,

Kami sampaikan banyak terimakasih kepada saudara Wakil Bupati yang telah mewakili Bupati Situbondo menandatangani Berita Acara Persetujuan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menjadi dokumen yang definitive.

Selanjutnya adalah acara Sambutan Kepala Daerah, kami persilahkan Mbak Ulfi untuk menyampaikan sambutannya.

=====

PENDAPAT AKHIR KEPAIA DAERAH

=====

----- **Wakil Bupati Situbondo (ULFIYAH, S.Pd.I)** -----



BUPATI SITUBONDO

**SAMBUTAN
WAKIL BUPATI SITUBONDO**

**PADA ACARA
RAPAT PARIPURNA PERSETUJUAN DAN
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024**

**SENIN, 02 JUNI 2025
RUANG RAPAT PLENO LT.II**

**ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA.**

ALHAMDULILLAH ROBBIL 'ALAMIN, WASHOLATU
WASSALAMU 'ALA ASROFIL AMBIYA'I WAL MURSALIN
SAYYIDINA WA HABIBINA WA SYAFIINA WA MAULANA

MUHAMMADIN WA 'ALA ALIHI WASOHBIBI AJMA'IN.
AMMA BA'DU.

YANG SAYA HORMATI :

1. KETUA DPRD, PARA WAKIL KETUA DPRD DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN SITUBONDO;
2. SEGENAP UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO; *Kepres Dan Sim*
3. *Put* SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO;
4. PARA STAF *1. Dik. Sek. W. an.* AHLI BUPATI, PARA ASISTEN, PARA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH, PARA KEPALA BAGIAN, PARA CAMAT, *Kep. Dik. Sal. an. 1. Dik. an.* DAN DIREKTUR RSUD/BUMD SE-KABUPATEN SITUBONDO; SERTA
5. *1. Dik. an.* PARA WARTAWAN DAN HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

ALHAMDULILLAH ROBBIL ALAMIN, PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA, TUHAN YANG MAHA ESA YANG TIADA HENTINYA MELIMPAHKAN NIKMAT, RAHMAT DAN KARUNIA-NYA KEPADA KITA SEMUA.

SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT MENGHADIRI
**“RAPAT PARIPURNA PERSETUJUAN DAN
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024”**
DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT SERTA DALAM
LINDUNGAN ALLAH SWT.

SHOLAWAT DAN SALAM SEMOGA SELALU
SENANTIASA TERCURAHKAN KEPADA NABI BESAR
MUHAMMAD SAW, KEPADA KELUARGANYA, PARA
SAHABAT DAN KITA SEBAGAI UMATNYA SEMOGA
MEMPEROLEH SYA'FAATNYA HINGGA AKHIR ZAMAN.
AAMIIN YAA RABBAL 'AALAMIIN.

Selamat Hari Sabtu Puncak!

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

RANGKAIAN PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG
PERTANGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2024

TELAH KITA LALUI BERSAMA MULAI DARI
PEMBAHASAN DI TINGKAT KOMISI, BADAN
ANGGARAN DAN TERAKHIR HARI INI YAKNI
PERSETUJUAN DAN PENETAPAN RAPERDA TENTANG
PERTANGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2024.

KAMI SAMPAIKAN APRESIASI KEPADA PIMPINAN
DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN YANG TELAH
MENCURAHKAN WAKTU, TENAGA DAN PERHATIAN
LEBIH UNTUK BERSAMA-SAMA MEMBAHAS DAN
MENCERMATI MATERI PERTANGGUNGJAWABAN INI.

TERHADAP SARAN, KRITIK, HASIL EVALUASI DAN
REKOMENDASI YANG TELAH DIBERIKAN, BAIK PADA
SAAT PEMBAHASAN KOMISI MAUPUN PEMBAHASAN
DI BADAN ANGGARAN, AKAN KAMI JADIKAN BAHAN
EVALUASI DAN PERBAIKAN PELAKSANAAN APBD DI
TAHUN YANG AKAN DATANG.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

PERTANGGUNGJAWABAN MERUPAKAN RANGKAIAN AKHIR DARI PROSES PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024, SAYA MEWAKILI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO MENGUCAPKAN TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF, MULAI DARI PROSES PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN SAMPAI DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024. *mengutip dari Qordoh Fiqh* *تصرف الإمام على ما يرى* *tinjauan seorang pemimpin yang bertanggung jawab* UNTUK KEDEPAN KITA HARUS SENANTIASA BERSAMA MEMPUNYAI KOMITMEN YANG KUAT UNTUK TERUS MENINGKATKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG LEBIH BAIK, SEHINGGA DAPAT BERDAMPAK PADA PERUBAHAN YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN SITUBONDO KE ARAH YANG LEBIH BAIK DEMI TERWUJUDNYA **SITUBONDO NAIK KELAS.**

KEGIATAN YANG KITA LAKSANAKAN HARI INI ADALAH BENTUK PENGABDIAN KITA, *sebagai Khasimul ummah* PADA BANGSA DAN NEGARA YANG KITA CINTAI DAN SEMOGA DICATAT OLEH ALLAH SWT SEBAGAI AMAL IBADAH.

AGENDA SELANJUTNYA YANG PERLU KITA SELESAIKAN BERSAMA ADALAH PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025. AGENDA TERSEBUT PERLU DILAKUKAN PERCEPATAN SESUAI DENGAN AMANAT SURAT EDARAN MENDAGRI NOMOR 900.1.1/640/SJ TANGGAL 11 FEBRUARI 2025 TENTANG PENYESUAIAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. /PERLU KOMITMEN BERSAMA AGAR AGENDA TERSEBUT

DAPAT BERJALAN SESUAI DENGAN JADWAL YANG TELAH DITETAPKAN.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

DEMIKIAN SAMBUTAN YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN DAN SELANJUTNYA SAYA BERKEWAJIBAN MENERUSKAN RAPERDA YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN TERSEBUT KEPADA GUBERNUR JAWA TIMUR UNTUK DILAKUKAN EVALUASI SEBELUM DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.
sebelum kami ciptain, selamat menunaikan ibadah puasa formid S. lhaan
SEMOGA ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA SELALU MEMBERIKAN KEKUATAN DAN KEMUDAHAN KEPADA KITA SEMUA, SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

WASSALAMU'ALAIKUM

WARAHMATULLAHI

WABARAKATUH.

WAKIL BUPATI SITUBONDO

Ttd.

ULFIYAH,S.Pd.I

----- PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.) -----

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Wakil Bupati Situbondo Mbak Ulfi telah menyampaikan sambutannya

Rapat Dewan Dan Hadirin Yang Kami Hormati,

Akhirnya perkenalkanlah kami atas nama Pimpinan serta segenap Anggota Dewan Yang Terhormat menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Wakil Bupati Situbondo beserta jajarannya dan semua pihak yang terkait, atas segala perhatian dan bantuan serta kehadirannya dalam Rapat Paripurna ini.

Dengan demikian Rapat Paripurna pertama dapat diselesaikan dengan lancar dan semoga memperoleh hasil sebagaimana harapan kita bersama.

=====

PENUTUP

=====

Dan dengan mengucapkan.

" alhamdulillah hirabbil 'alamin "

Rapat paripurna hari ini dinyatakan di tutup

KETOK 3 KALI

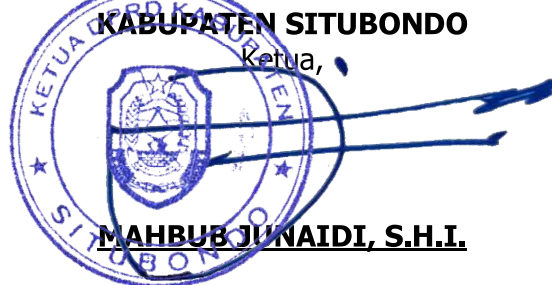
WALLAHU MUAFIQ ILA AQWAMITHORIQ

WASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABARAKATUH

Situbondo, 2 Juni 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Ketua,



MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.

BERKAS PENDUKUNG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 675613
Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

Situbondo, 28 Mei 2025

Nomor : 100.1.6.1/396/431.100./2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth 1. Sdr. Sekretaris Daerah;
2. Sdr. Staf Ahli;
3. Sdr. Asisten;
4. Sdr. Inspektur;
5. Sdr. Kepala OPD/Kepala Badan/Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah;
6. Sdr. Direktur RSUD/ BUMD;
7. Sdr. Camat se Kabupaten Situbondo.

di_

SITUBONDO

Memperhatikan Surat Badan Musyawarah Nomor :100.1.6.1/310/431.100/2025 tanggal 02 Mei 2025 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Situbondo Bulan Mei 2025, akan dilaksanakan Rapat Paripurna Persetujuan dan Penetapan (Pembicaraan Tingkat II) Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada Rapat Paripurna dimaksud pada :

Hari : Senin
Tanggal : 02 Juni 2025
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna/Lt. II DPRD Kab. Situbondo

Susunan Acara :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Laporan Badan Anggaran;
3. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi;
4. Persetujuan DPRD;
5. Penandatanganan Berita Acara;
6. Pendapat Akhir Kepala Daerah;
7. Penutup.

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Sdr. Sekretaris DPRD
Kab. Situbondo (untuk difasilitasi)

Catatan : Pakaian;
OPD : PSH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
KETUA

MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675813

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

Situbondo, 28 Mei 2025

Nomor : 100.1.6.1/395/431.100./2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth 1. Sdr. Ketua APDESI Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Sekretaris APDESI Kabupaten Situbondo.

Di_
SITUBONDO

Memperhatikan Surat Badan Musyawarah Nomor :100.1.6.1/310/431.100/2025 tanggal 02 Mei 2025 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Situbondo Bulan Mei 2025, akan dilaksanakan Rapat Paripurna Persetujuan dan Penetapan (Pembicaraan Tingkat II) Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada Rapat Paripurna dimaksud pada :

Hari : Senin
Tanggal : 02 Juni 2025
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna/Lt. II DPRD Kab. Situbondo

Susunan Acara :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Laporan Badan Anggaran;
3. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi;
4. Persetujuan DPRD;
5. Penandatanganan Berita Acara;
6. Pendapat Akhir Kepala Daerah;
7. Penutup.

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Sdr. Sekretaris DPRD
Kab. Situbondo (untuk difasilitasi).

Catatan : Pakaian;
Forkopimda : Yang Berlaku Pada Hari Itu



MAHBUB JUNAIDI, S.H.I



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

Situbondo, 28 Mei 2025

Nomor : 100.1.6.1/393/431.100./2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Situbondo

di_

SITUBONDO

Memperhatikan Surat Badan Musyawarah Nomor :100.1.6.1/310/431.100/2025 tanggal 02 Mei 2025 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Situbondo Bulan Mei 2025, akan dilaksanakan Rapat Paripurna Persetujuan dan Penetapan (Pembicaraan Tingkat II) Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada Rapat Paripurna dimaksud pada :

Hari : Senin
Tanggal : 02 Juni 2025
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna/Lt. II DPRD Kab. Situbondo

Susunan Acara :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Laporan Badan Anggaran;
3. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi;
4. Persetujuan DPRD;
5. Penandatanganan Berita Acara;
6. Pendapat Akhir Kepala Daerah;
7. Penutup.

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Sdr. Sekretaris DPRD
Kab. Situbondo (untuk difasilitasi)

Catatan : Pakaian;
Anggota : PSR





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 675813
Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

Situbondo, 28 Mei 2025

Nomor : 100.1.6.1/394/431.100./2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth 1. Sdr. Bupati Situbondo;
2. Sdr. Wakil Bupati Situbondo ;
3. Sdr. Komandan Kodim 0823 Situbondo ;
4. Sdr. Kapolres Situbondo;
5. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo;
6. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Situbondo.

di **SITUBONDO**

Memperhatikan Surat Badan Musyawarah Nomor :100.1.6.1/310/431.100/2025 tanggal 02 Mei 2025 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Situbondo Bulan Mei 2025, akan dilaksanakan Rapat Paripurna Persetujuan dan Penetapan (Pembicaraan Tingkat II) Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada Rapat Paripurna dimaksud pada :

Hari : Senin
Tanggal : 02 Juni 2025
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna/Lt. II DPRD Kab. Situbondo

Susunan Acara :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Laporan Badan Anggaran;
3. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi;
4. Persetujuan DPRD;
5. Penandatanganan Berita Acara;
6. Pendapat Akhir Kepala Daerah;
7. Penutup.

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Sdr. Sekretaris DPRD
Kab. Situbondo (untuk difasilitasi).

Catatan : Pakaian;
Forkopimda : Yang Bertaku Pada Hari Itu

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
KETUA

MAHBUB JUNAIDI S.H.I

DAFTAR HADIR



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 675613
Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

FRAKSI Partai Kebangkitan Bangsa

HARI/ TANGGAL : Senin, 02 Juni 2025
JAM : 13.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA : 1. Rapat Paripurna Persetujuan dan Penetapan (Pembicaraan Tingkat II)
Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024

NO	N A M A	J A B A T A N	TANDA-TANGAN	L/P
1	MAHBUB JUNAIDI, SH.I	KETUA DPRD	1	L
2	EDY WAHYUDI, SE	ANGGOTA DPRD	2	L
3	ZULFIKAR PURNAMA RAHMAN, S.T	ANGGOTA DPRD	3	L
4	FADLAILUL WAFIR., S.Pd	ANGGOTA DPRD	4	L
5	FIQI KRISTIA VINALOSA., Amd, Keb	ANGGOTA DPRD	5	P
6	JOHANTONO., S.Pd	ANGGOTA DPRD	6	L
7	SITI MARIA ULFA., SH	ANGGOTA DPRD	7	P
8	M. ASYHERI NUR., S. Sy	ANGGOTA DPRD	8	L
9	SUPRAPTO	ANGGOTA DPRD	9	L
10	YAZID HASYIM	ANGGOTA DPRD	10	L
11	MOKHAMMAD BADRI., ST	ANGGOTA DPRD	11	L
12	MUZAMMIL DAMAN HURI., SH	ANGGOTA DPRD	12	L
13	AHMAD JUNAIDI, SE	ANGGOTA DPRD	13	L

KET :

Hadir : Orang

Ijin : Orang

Sakit : Orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 675613
Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

FRAKSI Partai Persatuan Pembangunan

HARI/ TANGGAL : Senin, 02 Juni 2025
JAM : 13.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA : 1. Rapat Paripurna Persetujuan dan Penetapan (Pembicaraan Tingkat II)
Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024

NO	N A M A	J A B A T A N	TANDA-TANGAN	L/P
1	H. ABD. RAHMAN, SH., MH	WAKIL KETUA DPRD	1	L
2	Dr. Drs. H. SOFWAN HADI, M.Si	ANGGOTA DPRD	2	L
3	A R I F I N, SH., MM	ANGGOTA DPRD	3	L
4	H. FAISOL/ ABD. SYAKUR JALIL	ANGGOTA DPRD	4	L
5	NURIL HASHINA, SH	ANGGOTA DPRD	5	P
6	Dra. Hj. UMI MASLAHAH	ANGGOTA DPRD	6	P
7	IRMA NOERVADILA, S.Pd., M.Pd	ANGGOTA DPRD	7	P
8	M. FAISOL, S.Pd.I., M.Pd.I	ANGGOTA DPRD	8	L
9	MUHAMMAD HASAN ILLYIN, S.Psi	ANGGOTA DPRD	9	L

KET :

Hadir : Orang

Ijin : Orang

Sakit : Orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU (GIM)

HARI/ TANGGAL : Senin, 02 Juni 2025
JAM : 13.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA : 1. Rapat Paripurna Persetujuan dan Penetapan (Pembicaraan Tingkat II)
Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024

NO	N A M A	J A B A T A N	TANDA-TANGAN	L/P
1	Dr.H.HAMBALI.,M.Pd	WAKIL KETUA DPRD	1	L
2	ANDRIAN OKTADIANSYAH.,SE	ANGGOTA DPRD	2	L
3	DJAENUR RIDOH	ANGGOTA DPRD	3	L
4	AFIF REZA RIMUNDA.,SH	ANGGOTA DPRD	4	L
5	ZAIDANI	ANGGOTA DPRD	5	L
6	SAMSI IKA SARI.,S.Pd	ANGGOTA DPRD	6	L
7	HARI BUDI PRASETYA	ANGGOTA DPRD	7	P
8	ROZAN FATIH FH	ANGGOTA DPRD	8	L

KET :

Hadir : Orang

Ijin : Orang

Sakit : Orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 675613
Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

FRAKSI PDI-Perjuangan

HARI/ TANGGAL : Senin, 02 Juni 2025
JAM : 13.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA : 1. Rapat Paripurna Persetujuan dan Penetapan (Pembicaraan Tingkat II)
Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024

NO	N A M A	J A B A T A N	TANDA-TANGAN	L/P
1	ANDI HANDOKO	WAKIL KETUA DPRD	1	L
2	NINGSIH MS, S.Pd.I,M.Pd	ANGGOTA DPRD	2	P
3	RUDI AFianto, S.Pd., M.Pd	ANGGOTA DPRD	3	L
4	RISKIYAH NURFADILAH.,S.Sos	ANGGOTA DPRD	4	P
5	SUPOYO.,SH	ANGGOTA DPRD	5	L

KET :

Hadir : Orang

Ijin : Orang

Sakit : Orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 675613
Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

FRAKSI GOLKAR

HARI/ TANGGAL : Senin, 02 Juni 2025
JAM : 13.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA : 1. Rapat Paripurna Persetujuan dan Penetapan (Pembicaraan Tingkat II)
Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024

NO	N A M A	J A B A T A N	TANDA-TANGAN	L/P
1	H. RACHMAD.,SH.,M.Hum	ANGGOTA DPRD	1	L
2	HEROE SOEGIHARTONO, SH	ANGGOTA DPRD	2	L
3	Drs. H. SYAIFULLAH.,MM	ANGGOTA DPRD	3	L
4	SISWO PRANOTO, SH	ANGGOTA DPRD	4	L
5.	TUMYANI	ANGGOTA DPRD	5	P

KET :

Hadir : Orang

Ijin : Orang

Sakit : Orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 675613
Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

FRAKSI DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA

HARI/ TANGGAL : Senin, 02 Juni 2025
JAM : 13.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA : 1. Rapat Paripurna Persetujuan dan Penetapan (Pembicaraan Tingkat II)
Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024

NO	N A M A	J A B A T A N	TANDA-TANGAN	L/P
1	JANUR SASRA ANANDA, SE	ANGGOTA DPRD	1	L
2	YOGI PRATAMA.,S.Sos	ANGGOTA DPRD	2	L
3	TOTON BENI MARTONO.,S.Kep	ANGGOTA DPRD	3	L
4	H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI	ANGGOTA DPRD	4	L
5	AHMAD MUHLISIN,S.P.,M.M	ANGGOTA DPRD	5	L

KET :

Hadir : Orang

Ijin : Orang

Sakit : Orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

TANDA TERIMA MAMIN KOMISI-KOMISI

HARI/ TANGGAL : Senin, 02 Juni 2025
JAM : 13.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA : 1. Rapat Paripurna Persetujuan dan Penetapan (Pembicaraan Tingkat II)
Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024

NO	KOMISI	BANYAKNYA	TANDA-TANGAN
1	KOMISI I		
	ANGGOTA 10 ORANG	12 NASI KOTAK	1 
	PENDAMPING 1		
	ASISTEN 1		
2	KOMISI II		
	ANGGOTA 10 ORANG	12 NASI KOTAK	2
	PENDAMPING 1		
	ASISTEN 1		
3	KOMISI III		
	ANGGOTA 10 ORANG	12 NASI KOTAK	3 
	PENDAMPING 1		
	ASISTEN 1		
4	KOMISI IV		
	ANGGOTA 11 ORANG	13 NASI KOTAK	4 
	PENDAMPING 1		
	ASISTEN 1		
5	PIMPINAN		
	PIMPINAN 4	5 NASI KOTAK	5. 
	AJUDAN 1		
6	SATPOL PP		
	RESEPSIONIS 2	6 NASI KOTAK	6. 
	PENJAGAAN 4		



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman: //dprd.situbondokab.go.id, Pos-el: dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

HARI/ TANGGAL : Senin, 02 Juni 2025
 JAM : 13.00 WIB s/d selesai
 TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
 ACARA : 1. Rapat Paripurna Persetujuan dan Penetapan (Pembicaraan Tingkat II)
 Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024

NO.	N A M A	J A B A T A N	TANDA TANGAN	
1.	YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO, S.Sos	BUPATI	1.	
2.	ULFIYAH, S.Pd.I	WAKIL BUPATI		2.
3.	/	SEKRETARIS DAERAH	3.	
4.		KOMANDAN KODIM 0823		4.
5.	ENDRO A	KAPOLRES SITUBONDO	5.	
6.	Sigit Gian, S.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO		6.
7.		KETUA PENGADILAN NEGERI	7.	
ASISTEN				
8.	Drs. PRIO ANDOKO, M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		8.
9.	Drs. H. AKHMAD YULIANTO, M.Si	Plt. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	9.	
10.	DWI HERMAWAN SUSILO, SKM., M.Kes	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM		10.
STAF AHLI				
11.		STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	11.	
12.	H. SUGENG YUWONO, SH., M.Si	STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN		12.
13.	Dr. H. FATHORRAHMAN, M., Pd	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM	13.	
BAGIAN SEKRETARIAT				
14.	ABDUL KADIR JAE LANI, S.Sos., M.Si	KABAG TATA PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA		14.

15.	BHIMA SUNARTO PUTRA,SH	Plt.KABAG HUKUM	15.....	
16.	SIGIT SUSETYO RAHARJO.,SSTP.,M.Si	KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	16.....	
17.	IWAN SUBHAKTI,S.T	Plt.KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	17.....	
18.	Drs. H. IMAM SUHAIDI.,M.Si	KABAG PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SDA	18.....	
19.	KHATIB AL BAROZI.,SE	KABAG PENGADAAN BARANG DAN JASA	19.....	
20.	AGUNG WINTORO.,S.Sos.,M.Si	KABAG ORGANISASI	20.....	
21.	Dr.RATNA KOBASUSANTI.,S.Sos.,M.Si	KABAG UMUM	21.....	
22.	IMAS SUSILO WICAKSONO,S.AP.,M.M	KABAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	22.....	
INSPEKTORAT DAN BADAN				
23.	Ir. PUGUH SETIJARTO	INSPEKTUR	23.....	
24.	Drs. SUGIYONO.,M.Pd.I	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	24.....	
25.	Drs. HARYADI TEJOLAKSONO.,M.Si	BADAN PENDAPATAN DAERAH	25.....	
26.	Ir. SENTOT SUGIONO.,M.Si	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	26.....	
27.	SAMSURI,S.Sos.,MM	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	27.....	
28.	BUCHARI,S.E.T	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	28.....	
29.	SRUWI HARTANTO.,S.Pd.,MM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	29.....	
DINAS				
30.	Dr. H. FATHORRAHMAN.,M.,Pd	Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	30.....	
31.	Dr. SANDY HENDRAYONO.,M.KES	KEPALA DINAS KESEHATAN	31.....	
32.	ABDUL KADIR JAELANI.S.Sos.,M.Si	Plt.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	32.....	
33.	Ir. TIMBUL SURJANTO.,MM	KEPALA DINAS SOSIAL	33.....	
34.	KHOLIL.,SP.,MP	KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN	34.....	

35	H. MUHAMMAD IMAM DARMAJI.,M.Si	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNG AN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	35.....	
36	DADANG ARIES BINTORO.,S.Sos.,M.Si	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	36.....	
37	Drs. AHMAD YULIANTO.,M.Si	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	37.....	
38	Dra. Hj. TRI CAHYA SETIANINGSIH.,MM	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	38.....	
39	SURIYATNO.,SH	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	39.....	
40	Ir. RIKWAN SUGIHARTO.,MM	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	40.....	
41	ANNA KUSUMA.,SH.,M.Si	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	41.....	
42	EDY WIYONO.,S.Sos.,M.Si	KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	42.....	
43	Ir. QURRATUL AINI.,M.Si	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	43.....	
44	H. PUGUH WARDOYO.,S.Sos.,MM	KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	44.....	
45	DWI HERMAWAN SUSILO.,SKM.,M.Kes	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	45.....	
46	Drs. AHMAD DJUNAIDI.,M.Si	KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	46.....	
47	SOPAN EFENDI,SSTP.,M.Si	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	47.....	
BUMD				
48	dr. ROEKMY P.ARIO.,M.KES	DIREKTUR RSUD ABDOER RAHEM SITUBONDO	48.....	
49	dr.IMAM HARIYONO	DIREKTUR RSUD BESUKI	49.....	
50	Dr. SUDARMONO	DIREKTUR RSUD ASEMBAGUS	50.....	
51	ASY'ARI.,S.Sos.,MM	DIREKTUR PDAM	51.....	
52	ARIFIN HIDAYAT	DIREKTUR BANK SYARIAH	52.....	
KECAMATAN				
53	Hendri Triar A	CAMAT BANYUPUTIH	53.....	
54	RAHMAT FAUZI	CAMAT ASEMBAGUS	54.....	
55	Wira Putih	CAMAT JANGKAR	55.....	

56		CAMAT ARJASA		56.....
57		CAMAT KAPONGAN	57.....	
58	Abdel Kadir, SH	CAMAT MANGARAN		58.....
59	ARI YUDHIS	CAMAT PANJI	59.....	
60	HARI WATYUDI	CAMAT SITUBONDO		60.....
61	Suyono	CAMAT PANARUKAN	61.....	
62	Rupiyat	CAMAT KENDIT		62.....
65	YOFIE K.S.	CAMAT BUNGATAN	65.....	
66		CAMAT MLANDINGAN		66.....
67	GRANET M	CAMAT SUBOH	67.....	
68		CAMAT BESUKI		68.....
69	fuadri	CAMAT JATIBANTENG	69.....	
70	Dillis Roby K.	CAMAT SUMBERMALANG		70.....
71	Eel. Budi. yudo S.Sos	CAMAT BANYUGLUGUR		
UMUM				
72	Fitri Nur.f. S.Sos	Protokol Setda.kab.	72.....	
73	GATRA	Operator		73.....
74	YATNO	"	74.....	
75	SULI	"		75.....
76	Budi Hartono	"	76.....	
77	SAIFUL.	"		77.....
78	Fathoni	"	78.....	
79	Halim	Kominfo		79.....
80	Feri	"	80.....	
81	Syamsu.	J.Indonesia		81.....
82	Heru	data.co	82.....	
83	Emiliasari	Bag. Umum		83.....
84	Sanjaya	"	84.....	

85	H. Juharto 1811	Keren Keren		85
86	Roni	Sekjen -		86
87	Diana	Reporter		87
88	Gafur.	Da. Hb		88
89	Noni	Wartaw		89
90	B. Setiawan	Wartawan		90
91	Aisyah			91
92	Mobel			92
93	Leo			93
94	Acas			94
95	Rosa			95
96	Juhairita			96
97	Hamzah	SBI Naur		97
98	Siswanto I.C.	Prokurator		98
99	Fathur Rahman	Da. Prati Prip		99
100	Rizal.	Bojok Liri		100
101	M. Vedi Siswanto	Kegiatan		101
102				102
103				103
104				104
105				105
106				106
107				107
108				108
109				109
110				110
111				111
112				112
113				113

114	MARTIRA R.		114	
115	FIRDA YUNITA		115	
116	NANDA RAHESSTU.		116	
117			117	
118	FITRI FARLIANA		118	
119	AISYAH		119	
120	SAMSUL HABI		120	
121	RUDIANTO		121	
122	CHELSE OLIVA.		122	
123			123	
124			124	
125			125	
126			125	
126			126	
127			127	
128			128	
129			129	
130			130	
131			131	
132			132	
133			133	
134			134	
135			135	
136			136	
137			137	
138			138	
139			139	

140	DEVY SUSANTI, SH	Isb. Hukum		140	
141	LILIK HERWANINGSIH	Staf	141		
142	SUCI WANDU	"		142	
143	FIKA AYU	"	143		
144	SHERLY DEVE	"		144	
145	PRADHA BRANAN	Probopin	145		
146	VIDA Y	SIBER		146	
147	Alifia	Afeksi	147		
148	Anug	Media		148	
149	Yoni Fy	BRAD	149		
150	Fitah Citra	BRAD		150	
151	Rika L	BRAD	151		
152	Pori Ai	TA. GIM		152	
153	M. Riski H	DLH	153		
154	Alvin Agustiyaningrat	Anas Kebij		154	
155	ANDIE	MEDIA	155		
156	M. Rawa	Dispendikbud.		156	
157	Agustus S		157		
158	PANCA			158	
159	Dan Ayu-R	BRAD	159		
160	Adika	KAB. ICA		160	
161	Danati	BRAD	161		
162	AR/Fin			162	
163	finu	mlu	163		
164	Laol Amr	Setwan		164	
165	Shanty Oktangaty	Obat	165		

FOTO KEGIATAN































